

# PENDEKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

MAMPU 2014 - 2019





Publikasi ini disusun dan diterbitkan dengan dukungan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam buku ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia.

## Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

MAMPU 2014 - 2019

# DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	2
2. Latar belakang dan Konteks.....	4
3. Tentang MAMPU.....	7
Evolusi Pendekatan MAMPU di Bidang Pemberdayaan Ekonomi.....	7
4. Pendekatan Mitra MAMPU di Bidang Pemberdayaan Ekonomi.....	11
4.1 Para Mitra MAMPU yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi pekerja rumahan.....	11
4.2 Mitra MAMPU yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi pekerja migran.....	17
5. Temuan dan Diskusi.....	24
5.1 Perbandingan berbagai pendekatan Mitra MAMPU.....	24
5.2 Diskusi.....	30
6. Pembelajaran dan Rekomendasi untuk Inisiatif Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Masa Depan.....	33
6.1 Merancang dan mengelola intervensi pemberdayaan ekonomi.....	33
6.2 Karakteristik dan konteks kelompok sasaran.....	36
6.3 Kolaborasi dengan sektor swasta.....	37

# 01

## 1. PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2020, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) mengontrak SOLIDARITAS<sup>1</sup> untuk mendokumentasikan kerja pemberdayaan ekonomi yang dilakukan MAMPU. Tujuannya adalah mengeksplorasi berbagai pendekatan para Mitra MAMPU dalam pemberdayaan ekonomi serta mengidentifikasi pembelajaran bagi para mitra maupun program-program pembangunan ke depan. Dengan menggunakan data yang ada, SOLIDARITAS bekerja dengan Tim MAMPU selama lebih dari tiga bulan untuk mengidentifikasi berbagai topik dan mitra, menelaah dokumen-dokumen yang ada, mengidentifikasi temuan, serta menerima masukan dari para Mitra MAMPU.

Dokumen ini menyajikan ringkasan tentang pendekatan MAMPU pada pemberdayaan ekonomi dan menggunakan contoh-contoh dari empat Mitra MAMPU untuk menjawab pertanyaan: "apa yang dapat kita pelajari dari berbagai pendekatan yang digunakan Mitra MAMPU dalam melakukan Pemberdayaan Ekonomi?". Laporan ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap keempat Mitra MAMPU, dan bukan pula ditujukan untuk menilai kegiatan atau hasil yang mereka capai, selain apa yang telah didokumentasikan oleh MAMPU melalui laporan mitra atau program, maupun melalui studi-studi lain yang didanai MAMPU. Fokus dari laporan ini adalah memahami pendekatan-pendekatan yang telah digunakan oleh Mitra MAMPU dalam pemberdayaan ekonomi,

<sup>1</sup> SOLIDARITAS adalah sebuah perusahaan sosial Indonesia yang berfokus pada monitoring, evaluasi, kinerja, dan pembelajaran. Kami bekerja sama dengan berbagai organisasi yang merancang dan melaksanakan program pembangunan untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi, kredibel dan bermanfaat, serta untuk terus-menerus meningkatkan efektivitas kerja mereka.

persamaan dan perbedaan dari masing-masing pendekatan mitra, serta apa saja implikasinya terhadap Program MAMPU. Dokumen ini juga akan membahas bagaimana pengalaman tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh mitra MAMPU atau organisasi masyarakat sipil lain pada masa depan, atau program pembangunan lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan.

Bagian lain dari dokumen ini terstruktur sebagai berikut: Bagian 2 berisi latar belakang dan konteks pemberdayaan ekonomi di Indonesia secara umum dan MAMPU secara khusus. Diikuti dengan Bagian 3 yang menjelaskan ringkasan tentang Program MAMPU, serta menyoroti evolusi pendekatan MAMPU dalam pemberdayaan ekonomi di sepanjang usia program ini. Bagian 4 menjelaskan contoh-contoh bagaimana para Mitra MAMPU melaksanakan pemberdayaan ekonomi pada dua sub-kelompok, yaitu pekerja migran dan pekerja rumahan. Bagian 5 mendiskusikan temuan dan implikasi dari berbagai pendekatan yang digunakan para Mitra MAMPU, sementara Bagian 6 mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan para Mitra MAMPU, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan program-program pembangunan di masa depan.



# 02

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Laporan ini merupakan bagian dari upaya luas Program MAMPU untuk mendokumentasikan kegiatan dan pembelajaran dari para mitra kunci selama delapan tahun pelaksanaan program. Pemberdayaan ekonomi dipilih menjadi salah satu topik utama untuk didokumentasikan karena dua alasan: Pertama, karena para Mitra MAMPU selama ini selalu melaksanakan intervensi terkait kegiatan ekonomi, baik sebelum maupun selama kurun program, dan hampir semua mitra menyebutkan bahwa kegiatan ini (pemberdayaan ekonomi) merupakan salah satu komponen fundamental dalam keseluruhan model mereka. Alasan kedua adalah karena pemberdayaan ekonomi memiliki sejarah yang rumit selama kurun Program MAMPU. Pada area kerja ini sempat terjadi kesalahpahaman di tingkat internal MAMPU maupun antara MAMPU dan para mitranya. Setiap mitra berusaha menangani isu ini dengan berbagai cara masing-masing, sementara fokus MAMPU berevolusi seiring dengan meningkatnya pemahaman program terhadap berbagai isu dan prioritas politik yang ada. Karenanya, topik pemberdayaan ekonomi ini adalah topik yang menarik untuk dipahami, dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi para Mitra MAMPU dan setiap program pembangunan di masa depan yang fokus pada isu-isu pemberdayaan.

Guna mengkontekstualisasi cara-cara yang telah digunakan MAMPU dan para Mitra MAMPU dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi, sangat perlu untuk melihat apa saja alasan dan mengapa pemberdayaan ekonomi perempuan dipandang sebagai hal yang sangat penting.

Menurut berbagai literatur global, salah satu titik perubahan kunci dalam pembangunan suatu negara terjadi ketika perempuan memasuki angkatan kerja dalam skala nasional. Potensi ekonomi suatu negara ditentukan antara lain oleh ukuran angkatan kerjanya, dan rata-rata, perempuan membentuk setidaknya setengah dari populasi suatu negara. Di negara-negara di mana perempuan secara budaya dan sosial tidak dianjurkan memasuki angkatan kerja, berdampak pada terhambatnya secara otomatis potensi ekonomi

negara tersebut, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan sekitar 50% kapasitas angkatan kerjanya. Ini adalah gambaran kasar tentang apa insentif ekonomi yang tersedia di balik partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada intinya ialah mendorong perempuan memasuki angkatan kerja akan berdampak potensial yang signifikan bagi perekonomian nasional (Bank Dunia, 2012a).

Di saat yang sama, berbagai studi telah menunjukkan bahwa perempuan yang memasuki angkatan kerja formal menjadi lebih berdaya, dan ketika pendapatan perempuan meningkat, mereka akan mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan anak (Morrison et al., 2007). Karenanya, kerja berbayar perempuan berdampak pada rumah tangga dan tingkat lokal, serta berkontribusi pada hasil pembangunan yang lebih luas seperti kesehatan dan pendidikan.

Meski manfaat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan tampak jelas, jalan untuk mencapai tujuan ini masih belum terlalu jelas. Masih terdapat banyak sekali hambatan sosial, budaya, dan logistik, yang menghalangi perempuan melakukan kerja berbayar. Dalam budaya patriarkis, di mana pembagian kerja antara ranah domestik dan publik didasarkan pada gender, tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak, memasak dan kerja rumah lainnya secara tradisional dibebankan kepada perempuan. Tugas-tugas ini memakan waktu perempuan secara signifikan, sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa untuk melakukan kerja berbayar. Jenis pekerjaan ini sering disebut sebagai "kerja domestik tak berbayar", untuk menegaskan bahwa meskipun seringkali dianggap tidak signifikan, perempuan dalam budaya patriarkis seringkali melakukan pekerjaan yang setara dengan pekerjaan penuh waktu untuk menjaga agar rumah tangga tetap berjalan baik.

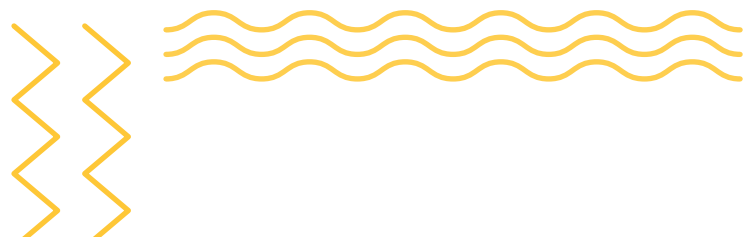
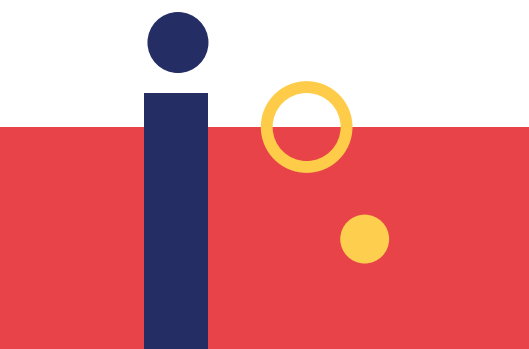
Seluruh isu di atas juga sedang terjadi dalam konteks Indonesia. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih tetap stagnan selama dua dekade terakhir (Schaner and Theys, 2020), dengan partisipasi pada angkatan kerja memuncak pada kelompok usia 40-49 tahun dan jumlah agregatnya (partisipasi perempuan pada angkatan kerja) menurun drastis pada perempuan setelah menikah (AIPEG, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan, pengasuhan anak, dan kegiatan domestik menjadi prioritas bagi banyak perempuan saat mereka masih dalam usia melahirkan, dan

perempuan dapat bergabung kembali pada angkatan kerja setelah anak mereka lebih mandiri, atau jika situasi sosial-ekonominya mengharuskan mereka untuk bekerja (AIPEG, 2017; Schaner and Theys, 2020).

Ekspektasi sosial dan budaya yang menyatakan perempuan harus memprioritaskan tanggung jawab domestik juga berarti terbatasnya fasilitas yang tersedia bagi perempuan yang memilih untuk bekerja (seperti penitipan anak). Banyak tempat kerja yang belum dirancang untuk mengakomodasi perempuan yang bekerja sambil mengurus keluarga (seperti posisi paruh-waktu, jam kerja fleksibel, tempat penitipan bayi/creches, dan ruang menyusui). Terdapat berbagai isu yang dihadapi oleh semua perempuan, namun perempuan di wilayah perdesaan dan/atau dari kelompok sosial-ekonomi rendah menghadapi hambatan tambahan terkait ketersediaan layanan seperti transportasi dan penitipan anak, serta harga layanan tersebut.

Hambatan-hambatan ini mengakibatkan banyak perempuan memilih untuk memasuki 'ekonomi informal', yaitu sebuah istilah umum yang menggambarkan kegiatan ekonomi yang tidak dikenakan pajak atau dimonitor oleh negara. Estimasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi informal membentuk 57% dari angkatan kerja Indonesia (BPS, 2019). Bagi banyak perempuan, sektor informal memberikan fleksibilitas yang seringkali tidak tersedia di sektor formal, dan juga menyediakan lapangan kerja yang dapat diakses perempuan berpendidikan rendah. Akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah, bekerja di sektor informal seringkali tidak menguntungkan (pemberi kerja tidak berkewajiban membayar upah minimal), tidak aman (standar keselamatan tidak ditegakkan), dan eksploitatif (jarang menggunakan kontrak, sehingga tidak ada kesepakatan mengenai jam kerja, bayaran dan kondisi, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Opsi lain bekerja di sektor informal adalah perempuan menjalankan usaha mikro atau kecilnya sendiri. Namun, usaha-usaha ini cenderung menghasilkan keuntungan rendah (World Bank, 2012b) karena kurang memperhatikan kebutuhan pasar (MEDA, 2017).

Kondisi di atas merupakan ringkasan dari manfaat partisipasi ekonomi perempuan, yang juga menyoroti hambatan sosial, budaya dan logistik untuk memasuki sektor formal dan isu lain yang dihadapi perempuan bekerja di sektor informal. Bagian berikutnya memaparkan secara singkat tentang MAMPU, dan bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan telah dikonseptualisasikan di sepanjang program ini.







# 03

## 3. TENTANG MAMPU

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) adalah sebuah program yang didanai oleh Pemerintah Australia yang berkolaborasi erat dengan Bappenas sebagai wakil Pemerintah Indonesia. Program MAMPU mendukung jejaring dan koalisi organisasi perempuan dan yang terkait dengan gender (para Mitra MAMPU), serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, dan layanan pemerintah. Tujuan akhir proses MAMPU ini adalah meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke berbagai layanan dan program penting. Tujuan akhir MAMPU adalah berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia secara luas.

MAMPU memberikan dukungan hibah dan pengembangan kapasitas kepada 13 organisasi mitra utama yang bergerak di berbagai isu, termasuk perlindungan sosial, kesehatan seksual dan hak reproduksi, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mempromosikan anggota parlemen perempuan, serta yang menjadi fokus dari dokumen ini, yaitu pekerjaan layak dan potensi ekonomi.

### **Evolusi Pendekatan MAMPU di Bidang Pemberdayaan Ekonomi**

Bagian ini memaparkan evolusi bagaimana pemberdayaan ekonomi dikonseptualisasikan di tingkat program di MAMPU. Informasi ini diperoleh dari publikasi MAMPU dan mencerminkan posisi formal Program MAMPU, dan karenanya tidak selalu menggambarkan pandangan/opini dari sisi internal Tim MAMPU. Selain itu, perubahan proses berpikir di tingkat program ini tidak serta merta tercermin di dalam praktik para Mitra MAMPU.

#### **Fase I: 2012 - 2015**

Fokus MAMPU pada pemberdayaan ekonomi telah berevolusi di sepanjang usia program ini. Tujuan awal MAMPU yang telah dinyatakan di Dokumen Desain Program MAMPU Bagian A dan B (2012) adalah "peningkatan akses dan pencaharian bagi perempuan miskin di Indonesia di wilayah geografis terpilih di dalam tema-tema sasaran", dan salah satu pertanyaan evaluasi kunci untuk program tersebut adalah "Bagaimana program ini telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan pencaharian bagi perempuan miskin?" (KEQ3). Terdapat dua tema terkait kegiatan ekonomi di desain awal:

1. "Meningkatkan akses perempuan kepada peluang kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja", dengan fokus pada dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam ekonomi formal dan bekerja sama dengan aktor sektor swasta untuk mengurangi praktik diskriminatif; dan
2. "Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri", yang berfokus pada reformasi kebijakan, inklusi finansial, dan pengawasan agen perekrutan PMI.

Dokumen desain fase satu tersebut tidak menyebut tentang 'pemberdayaan ekonomi', namun fokus pada 'pencapaian', yang tidak didefinisikan secara spesifik di dalamnya. Istilah 'pencapaian' juga digunakan dalam teori program dengan fokus utama dari "pencapaian" adalah akses kepada pekerjaan dan diskriminasi di tempat kerja, yang menyebutkan peningkatan pendapatan sebagai salah satu contoh hasil yang diharapkan. Mitra untuk area tematik ini adalah Organisasi Buruh Internasional (Internasional Labour Organisation/ILO).

### **Konsolidasi Teori Perubahan dan Model Pemberdayaan (Ekonomi) MAMPU: 2015 - 2017**

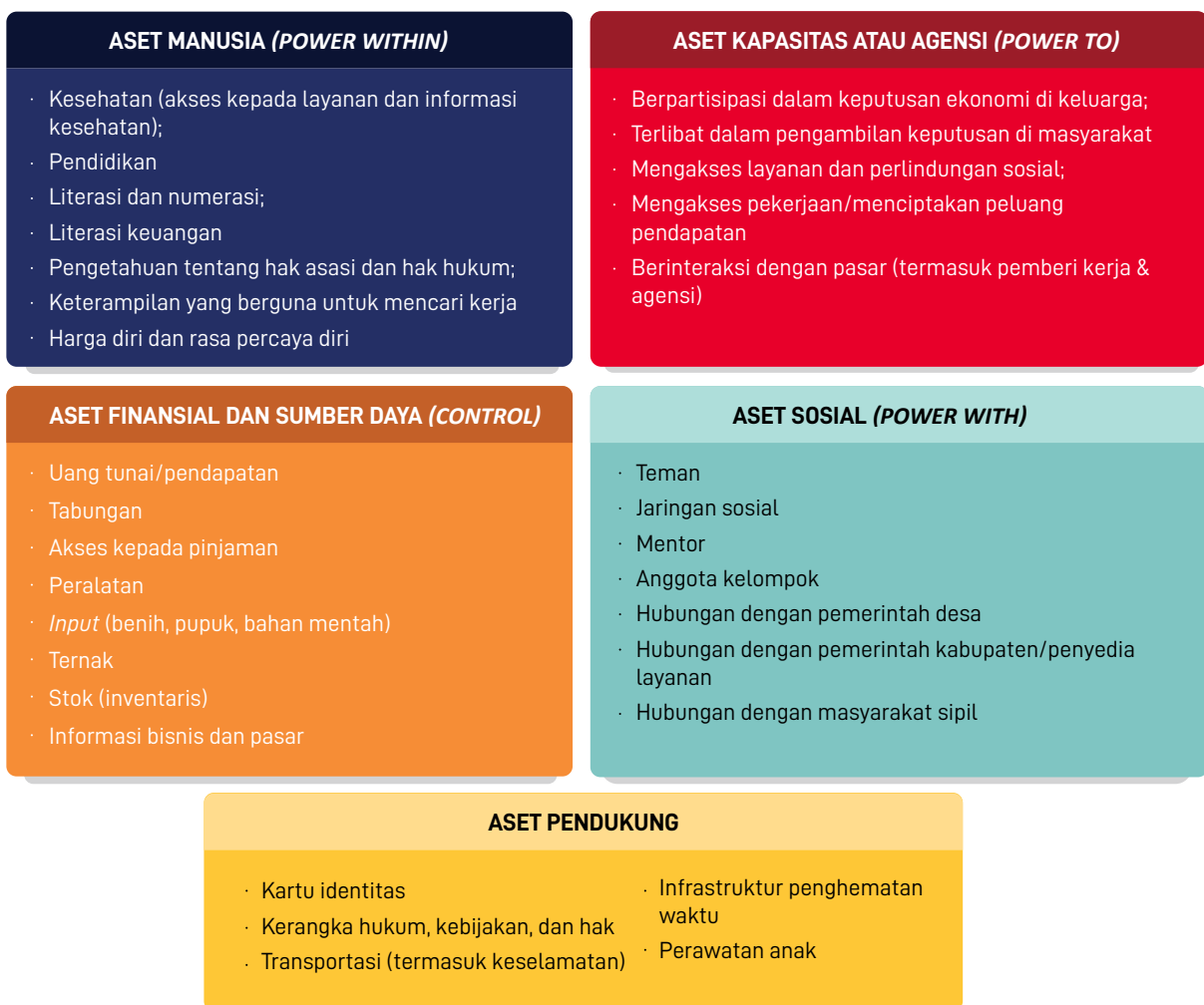
Pada tahun 2015, terdapat sejumlah indikasi pergeseran fokus area tematik "akses kepada pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja", berdasarkan Rencana ke Depan MAMPU (*MAMPU Forward Plan*) yang dipublikasikan di tahun yang sama. Fokus ini mengalami pergeseran ke ranah pekerja rumahan, dengan alasan-alasan berikut: sektor ini didominasi oleh perempuan, pekerja rumahan seringkali bekerja di dalam rantai nilai yang "menjembatani sektor formal dan informal" (*MAMPU Forward Plan*, 2015), dan mereka menghadapi kekurangan akses kepada jaminan sosial, bayaran rendah, serta eksploitasi terhadap karyawan. Dokumen rencana ini juga mengidentifikasi adanya peningkatan perhatian pada upaya penghapusan hambatan dalam mengakses lapangan kerja pada Fase Dua program, serta mengidentifikasi potensi peluang untuk melibatkan sektor swasta, termasuk produsen garmen, alas kaki, dan juga IKEA. Hingga tahap ini, 'Pencapaian' masih memperoleh dukungan kuat: "Para mitra dan anggota komunitas sangat mendukung fokus pada dukungan terhadap pencapaian pada MAMPU fase berikutnya, sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap pemberdayaan perempuan", (*Laporan Verifikasi MAMPU tentang Cerita Kinerja/MAMPU Verification Report of the Performance Story*), yang juga diidentifikasi sebagai area (terkait desain dan teori program) yang memerlukan "strategi yang jelas untuk menciptakan dampak di area ini, mengingat kurang jelasnya topik ini di desain awal" (*MAMPU Forward Plan*, 2015).

Sebagai bagian dari respons terhadap kebutuhan ini, sebuah makalah internal berjudul '*Pendekatan MAMPU Pada Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*' disusun pada 2015, yang menyoroti kerangka pemberdayaan ekonomi (lihat diagram di bawah). Model ini adalah gabungan dari beberapa pendekatan lainnya<sup>2</sup> dan mengidentifikasi lima aset atau kekuatan yang berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi. Kelima aset tersebut adalah: (1) aset manusia (*human assets*), atau kapabilitas individu perempuan, termasuk kemandirian dan rasa percaya diri; (2) aset finansial dan sumber daya (*financial and resources assets*) yaitu kendali dan akses terhadap pendapatan, modal dan input; (3) aset kapasitas atau agensi (*agency assets*), yaitu kemampuan untuk mengakses perlindungan sosial, peluang ekonomi, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di keluarga dan komunitas; (4) aset sosial (*social assets*), yang mencakup jaringan sosial, hubungan dengan pemerintah, masyarakat sipil dan

2 Dokumen ini menggunakan dua definisi pemberdayaan ekonomi, yaitu yang digunakan oleh ODI dan oleh program Girl Effect.

kelompok masyarakat; dan (5) aset pendukung (*enabling assets*), berupa lingkungan yang mendukung dan memungkinkan aset-aset lain bekerja termasuk hasil-hasil pemberdayaan, seperti identitas hukum, transportasi, penitipan anak, dan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung. Kerangka ini mengkonseptualisasi pemberdayaan sebagai proses dan hasil (*outcome*), yang berarti, kelima aset tersebut harus dipenuhi secara memadai sebelum seorang perempuan dikatakan sepenuhnya berdaya. Model ini adalah sebuah pendekatan holistik yang menekankan bahwa, meskipun penciptaan pendapatan adalah aspek kunci, namun belum mencukupi untuk mencapai pemberdayaan ekonomi. Di dalam makalah ini disarankan agar model dapat digunakan di dua tingkatan, baik di tingkat nasional sebagai cara untuk mengidentifikasi pada area mana saja para Mitra MAMPU telah atau akan berkontribusi pada suatu area tematik tertentu (misalnya terkait pekerja migran Indonesia/PMI), dan juga di tingkat mitra sebagai cara untuk menginisiasi diskusi terkait bagaimana pendekatan mitra dapat berkontribusi pada seluruh aset serta sebagai cara untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan yang dapat terjadi dengan menggunakan lensa masing-masing aset. Perlu dipahami pula bahwa kerangka ini dapat diadaptasi lebih lanjut secara kolektif ataupun oleh masing-masing mitra agar dapat lebih mencerminkan kerja-kerja mereka.

### KERANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (MAMPU, 2015)



## Phase II (2017 - 2020): Pergeseran fokus pada pencaharian

Pada saat Rencana Strategis MAMPU 2017-2020 diterbitkan pada tahun 2017, tujuan MAMPU telah direvisi dan tidak lagi menyebutkan "pencaharian". Saat itu tujuan MAMPU dinyatakan sebagai: "...meningkatkan akses para perempuan miskin di Indonesia kepada layanan-layanan penting serta program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendukung pencapaian target-target SDG Pemerintah Indonesia yang relevan". Selain itu, fokus KEQ 3 telah diubah menjadi "peningkatan akses bagi perempuan miskin kepada layanan dan program penting pemerintah". Pada saat itu, kemitraan MAMPU dengan ILO telah berakhir, namun organisasi-organisasi yang sebelumnya bekerja di bawah ILO, yaitu BITRA, Yasanti, TURC, dan MWPRI menjadi mitra nasional.

Meskipun terdapat sejumlah perubahan formal terkait bagaimana 'pencaharian' dimasukkan sebagai hasil (*outcome*) formal MAMPU, di tingkat internal program maupun rekan-rekan dari lembaga pemerintah terdapat kesadaran bahwa kerja-kerja dalam kegiatan ekonomi masih merupakan aspek penting dari aksi kolektif dan pelaksanaan kerja para mitra di akar rumput. Hal ini tampak jelas pada studi Aksi Kolektif Perempuan (Migunani, 2017) dan pembuatan laporan tentang diskriminasi lapangan kerja dan tempat kerja pada tahun 2017.

Namun, isu-isu terkait kegiatan ekonomi masih ada, yang antara lain ditunjukkan pada Cerita Kinerja MAMPU 2018 (*2018 MAMPU Performance Story*) yang menyebutkan masukan berulang dari para mitra tentang "adanya kebutuhan untuk memperjelas dan meningkatkan perhatian pada pencaharian dan pemberdayaan ekonomi", kurangnya pelibatan sektor swasta, dan kurang terwakilinya pemberdayaan ekonomi di dalam Teori Perubahan.

# 04. PENDEKATAN MITRA MAMPU DI BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI

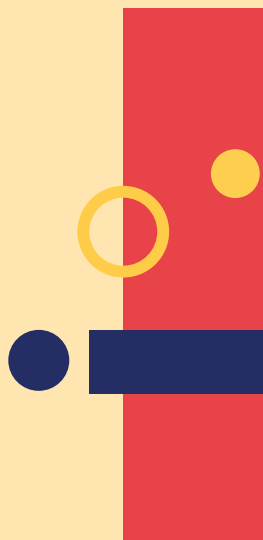
Bagian berikut menjelaskan bagaimana pendekatan para mitra terhadap pemberdayaan ekonomi, dengan menggunakan kerangka pemberdayaan ekonomi MAMPU 2015 sebagai lensa analisis. Perlu dipahami bahwa para Mitra MAMPU sendiri tidak secara tegas menggunakan kerangka ini dalam merancang dan melaporkan seluruh kegiatan mereka. Dalam hal ini, Kerangka MAMPU berfungsi sebagai struktur untuk membantu memahami intervensi para Mitra MAMPU di masa lampau. Karena besarnya jumlah Mitra MAMPU, bagian ini akan berfokus pada empat mitra yang berfokus pada tema pekerja rumahan dan pekerja migran, karena terdapat ekspektasi agar para mitra menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kondisi ekonomi para perempuan yang menjadi dampingan mereka.

## 4.1 Para Mitra MAMPU yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi pekerja rumahan

Dalam konteks MAMPU, "pekerja rumahan" adalah "pekerja dependen dan di bawah subkontrak yang bekerja langsung maupun tidak langsung untuk pemberi kerja atau perantaranya, yang biasanya menggunakan basis *piece rate* - atau dikenal juga sebagai pekerja *piece rate*, *out worker*, atau pekerja sistem *putting out*" (ILO, 2015), yang ciri utamanya adalah lokasi kerja tidak disediakan oleh pemberi kerja, namun dilakukan di rumah pekerja sendiri, atau di rumah rekan pekerja tersebut (SMERU, 2019).

Sektor ini menjadi perhatian MAMPU karena perempuan membentuk mayoritas pekerja rumahan, sehingga prevalensi perempuan di sektor ini sangat tinggi (ADB, 2011); rendahnya kesadaran di kalangan mereka atas hak-hak mereka; serta karena kerentanan yang terjadi di dalam jenis pekerjaan ini, termasuk kurangnya perlindungan hukum, upah rendah, dan buruknya kondisi kerja (MEDA, 2017). MAMPU bekerja dengan ILO sejak 2012 - 2017 untuk menanggulangi kurangnya kesadaran akan hak pekerja rumahan, ketiadaan kebijakan pemerintah yang mendukung hak para pekerja rumahan, dan kurangnya akuntabilitas dari sisi pemberi kerja. Sejak 2017, para mitra lokal terus mendukung para pekerja rumahan di ketiga elemen teori perubahan MAMPU: aksi kolektif, meningkatkan suara dan pengaruh perempuan, dan meningkatkan akses kepada layanan pemerintah.

Bagian berikut berisi penjelasan singkat terkait konteks pekerja rumahan di Indonesia, termasuk isu-isu kunci yang dihadapi pekerja rumahan perempuan dan para Mitra MAMPU yang berupaya mengatasi isu-isu tersebut. Bagian akhir bab ini menjelaskan tentang sejumlah kegiatan dan hasil kunci dari beberapa Mitra MAMPU yang dipilih.



## Pekerja Rumahan di Indonesia

Data mengenai pekerja rumahan di Indonesia masih sangat terbatas. Karakteristik pekerjaan rumahan dan kurangnya data mengakibatkan pekerja rumahan secara umum “tersembunyi” dari pemerintah dan pemberi kerja membuat mereka berada di posisi yang sangat rentan.

UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 menetapkan hak-hak seluruh pekerja Indonesia, namun peraturan ini hanya berlaku bagi para pekerja sektor formal. Para pekerja rumahan tidak memiliki status hukum yang jelas dan seringkali dianggap sebagai bagian dari sektor informal yang membuat mereka tereksklusi dari perlindungan UU Ketenagakerjaan. Sebuah studi tentang pekerja rumahan pada tahun 2015 yang didanai oleh MAMPU dan dilaksanakan oleh ILO menemukan bahwa 42% pekerja rumahan bahkan tidak memiliki perjanjian tertulis dengan pemberi kerjanya.<sup>3</sup> Ini berarti, para pekerja rumahan tidak mendapatkan perlindungan dari negara, dan pemberi kerja pun tidak wajib membayarkan upah minimal, memberikan peralatan yang layak, ataupun memberikan layanan atau asuransi kesehatan.

Studi ILO-MAMPU ini memberikan sejumlah gambaran tentang karakteristik pekerja rumahan di lokasi-lokasi dampingan MAMPU. Temuan yang ada menunjukkan bahwa perempuan pekerja rumahan umumnya berpendidikan lebih rendah dari rata-rata masyarakat, dan meskipun kerja rumahan adalah sumber utama penghasilan mereka, pekerja rumahan juga cenderung melakukan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari kerja rumahan masih tidak menentu atau tidak stabil (ILO, 2015). Beberapa karakteristik khas yang membuat kerja rumahan menjadi jenis pekerjaan yang rentan justru menjadi alasan yang membuat banyak perempuan tertarik untuk melakukan pekerjaan ini. Tanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak adalah hambatan umum yang menghalangi perempuan bekerja secara formal. Sehingga pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk bekerja di rumah secara fleksibel sambil melakukan kegiatan lain menjadi pilihan yang memungkinkan bagi banyak perempuan yang ingin mengerjakan kegiatan ekonomi sambil mengurus rumah tangga. Mayoritas perempuan pekerja rumahan yang dilibatkan dalam studi ini tidak berkeinginan untuk memasuki ekonomi formal atau bekerja penuh waktu, dan hanya akan mempertimbangkannya jika pekerjaan tersebut menawarkan fleksibilitas yang sama dengan kerja rumahan (ILO, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah manfaat kunci yang membuat perempuan tetap tertarik mengerjakan jenis pekerjaan ini. Studi ini juga menyoroti berbagai sektor yang dikerjakan para pekerja rumahan, termasuk sektor pengolahan makanan, garmen, dan produksi peralatan elektronik (ILO, 2015), yang menunjukkan begitu beragamnya jenis pekerjaan ini.

Di sepanjang usia Program MAMPU, ILO, BITRA, Yasanti, MWPRI, dan TURC telah berkontribusi kepada upaya MAMPU mendukung pemberdayaan ekonomi, yang pada awalnya berfokus

3 Hanya dua persen perempuan di dalam studi ILO tersebut yang mengatakan bahwa mereka memiliki kontrak atau perjanjian tertulis dengan pemberi kerja, sementara 42% lainnya bahkan tidak mendapatkan perjanjian lisan sekalipun.

pada akses ke lapangan kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus ini telah bergeser menjadi meningkatkan kondisi kerja bagi para pekerja rumahan, dan mendukung pencaharian dengan cara selain kerja rumahan. Organisasi-organisasi yang terus bekerja bersama MAMPU dan menjadi fokus dari bab ini adalah TURC, BITRA, dan Yasanti:

- Trade Union Rights Centre (TURC) didirikan pada tahun 2003 dan mendukung pembangunan suatu gerakan serikat pekerja independen di Indonesia. TURC mengadvokasi reformasi undang-undang dan peraturan perburuhan di tingkat nasional dan daerah, serta membangun kapasitas berorganisasi para pekerja.
- Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) didirikan pada tahun 1986 untuk bekerja bersama komunitas miskin dan marjinal di Sumatera Utara untuk mengadvokasi kebijakan yang membantu masyarakat marjinal serta membangkitkan kesadaran publik terkait advokasi kebijakan dan pemberdayaan ekonomi.
- Yayasan Anisa Swasti (Yasanti) adalah sebuah NGO yang didirikan pada tahun 1982 di Yogyakarta, dan bekerja memberdayakan pekerja rumahan melalui pengorganisasian komunitas, pendidikan, advokasi, dan kemandirian ekonomi. Yasanti berfokus pada empat kelompok target utama: pekerja rumahan, buruh perempuan di pasar tradisional (BURUH gendong), pekerja pabrik, dan wirausahawan perempuan.

### **Kegiatan Mitra MAMPU**

Bagian ini menggunakan lima aset kerangka pemberdayaan ekonomi MAMPU<sup>4</sup> untuk menjelaskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan hasil kunci yang telah dicapai oleh TURC, BITRA, dan Yasanti.

### **Membentuk kelompok sebagai landasan untuk melakukan aksi (aset sosial)**

Ketiga organisasi Mitra MAMPU membentuk kelompok pekerja rumahan (atau serikat pekerja rumahan) sebagai landasan bagi seluruh kegiatan lainnya: TURC telah mengorganisasi para pekerja rumahan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Sukoharjo dan Kota Solo di Jawa Tengah, Kota Tangerang di Banten, dan Jakarta; BITRA telah mengorganisasi kelompok di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kota Medan, serta di tingkat provinsi di Sumatera Utara; sementara Yasanti telah mengorganisasi kelompok di Kota dan Kabupaten Semarang di Jawa Tengah, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, yang merupakan bagian dari Provinsi DIY. Secara total, terdapat sekitar 1.700 pekerja rumahan yang telah bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Para Mitra MAMPU juga telah membentuk Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) yang semakin memperluas jaringan pekerja rumahan.

Pendirian kelompok-kelompok ini meningkatkan aset sosial para anggota kelompok dengan meningkatkan jaringan sosial, serta menghubungkan berbagai kelompok dan anggotanya ke pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

<sup>4</sup> Lihat Bagian 3 untuk melihat penjelasan mengenai kerangka tersebut

**Nunik Kristiana, pekerja rumahan dari BANTUL, Yogyakarta (Januari 2019)**

Kelompok Ibu Mandiri dibentuk pada 10 November 2016, dan dengan dukungan dari Yasanti, kami telah mengalami banyak perubahan di berbagai bidang. Misalnya, sekarang kami sudah bisa berbicara dengan pemerintah desa, Disnaker Kabupaten Bantul dan Yogyakarta, Bappeda di Bantul, DPRD, dan lainnya. Kami juga dapat mengakses berbagai program dari Disnaker Kabupaten seperti pelatihan. Dengan pendampingan (*mentoring*) dari Yasanti, banyak anggota kami telah berhasil bernegosiasi dengan pemberi kerja untuk meningkatkan upah serta memenuhi hak asasi mereka. Dengan bimbingan Yasanti, kami dapat membantu anggota-anggota kami untuk menjadi lebih sejahtera. Dari sisi perubahan pribadi, sekarang saya sudah berani untuk berbicara di depan banyak orang, dan saya dapat mengakses program-program pemerintah, misalnya pelatihan kesehatan dan keselamatan dari Disnaker dan pemeriksaan kesehatan dari Dinkes.

**Memanfaatkan kelompok pekerja rumahan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan berbasis hak bagi pekerja rumahan (aset Manusia)**

Setelah membentuk kelompok-kelompok pekerja rumahan, ketiga Mitra MAMPU membangun kapasitas para anggota kelompok tersebut (aset manusia) dengan memberikan pelatihan negosiasi, gender dan kesetaraan sosial, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, pengorganisasian komunitas, keterampilan teknis seperti menganyam, serta keterampilan bisnis dan pemasaran.

TURC telah memberikan pendampingan bagi kelompok pekerja rumahan untuk membuat usaha baru (yang terpisah dari kerja rumahan yang mereka geluti) agar menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para anggota. Dukungan TURC berfokus pada mengidentifikasi produk-produk kunci (berdasarkan akses yang tersedia bagi anggota ke bahan mentah, kemudahan pemasaran, dan keterampilan yang ada di kelompok tersebut), lalu memberikan pembangunan kapasitas bagi para anggota kelompok untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keterampilan manajemen. Selain itu, TURC juga menghubungkan kelompok pekerja rumahan dengan organisasi-organisasi yang memberikan dukungan pelatihan, finansial, dan pemasaran. Beberapa contoh produk kunci yang dipilih oleh kelompok-kelompok pekerja rumahan TURC adalah anyaman rotan di Cirebon, produk makanan di Sukabumi, Sukoharjo, dan Jakarta, serta menjahit di Solo, Sukabumi, dan Tangerang.

Yasanti dan BITRA juga memberikan pelatihan tentang hak pekerja rumahan dan keterampilan negosiasi untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Sebagai hasilnya, kelompok pekerja rumahan binaan TURC yang membuat kantong plastik di Tangerang berhasil menaikkan upahnya sebesar Rp1000, sementara penjahit di Sukabumi menaikkan upah per potong (*piece-rate*) mereka sebesar Rp1.500. Salah satu kelompok dampingan Yasanti yang membuat sepatu telah bernegosiasi dengan pemberi kerja mereka untuk meningkatkan harga per potong (*piece-rate*) dari Rp17.500 menjadi antara Rp47.000 dan Rp56.600 (tergantung pada jenis sepatu), ditambah asuransi jika terjadi kecelakaan kerja. Kelompok ini juga telah berhasil menegosiasikan perpanjangan tenggat waktu, sehingga penyerahan produk menjadi setiap dua hari sekali, dan bukan setiap hari. Para anggota kelompok juga memperoleh kesempatan mempelajari keterampilan baru, baik untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah mereka buat sebagai pekerja rumahan maupun membuat produk baru.



BITRA juga memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan untuk membantu mereka membentuk atau memperkuat kelompok dan usaha pribadi di luar kerja rumahan. BITRA mendukung berbagai kelompok dan para anggotanya untuk memperoleh pelatihan keterampilan untuk meningkatkan nilai produk mereka, termasuk pelatihan untuk membuat seprai dan sarung bantal, panganan (snack), sabun, dan hijab. Sebanyak 27 anggota kelompok mendapatkan pelatihan memijat (*massage*) dan membuat JAMU. Para anggota kelompok BITRA juga mendapatkan pelatihan tentang UU Ketenagakerjaan, keterampilan negosiasi, dan literasi finansial.

### **Memanfaatkan kelompok pekerja rumahan untuk meningkatkan akses ke sumber keuangan (aset finansial dan sumber daya)**

BITRA telah memanfaatkan aset sosial dari kelompok pekerja rumahan untuk membentuk sebuah koperasi kredit (Credit Union). Saat ini, sebanyak 29 kelompok dan 566 anggota telah berkontribusi kepada credit union tersebut, yang bernilai total sebesar Rp198.000.000 pada Maret 2020 (lebih dari AUD18.600). Dana ini menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi usaha-usaha para anggotanya, dan juga sebagai pinjaman untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga semakin meningkatkan aset finansial anggota kelompok tersebut. Di masa mendatang, sisa dana dari credit union akan digunakan untuk mendukung operasi serikat pekerja rumahan yang telah dibentuk oleh BITRA.

### **Sebagai hasil hubungan dengan para Mitra MAMPU, aset sosial, kelembagaan, dan keuangan para pekerja rumahan juga telah meningkat**

Bagi kelompok-kelompok pekerja rumahan dampingan TURC, kombinasi peningkatan aset sosial dan manusia ini menghasilkan koneksi dan akses ke berbagai program dukungan pemerintah. Koperasi pekerja rumahan Cirebon dibentuk untuk menjadi bagian dari proyek pilot nasional terkait koperasi perempuan (sebagai hasil dari kunjungan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM) dan juga menerima pelatihan dan dukungan finansial dari pemerintah daerah, dengan harapan koperasi tersebut dapat menjadi perantara bagi para perempuan pekerja rumahan. Selain itu, kelompok pekerja rumahan di Sukabumi juga telah memperoleh akses ke pelatihan dan pendanaan kewirausahaan yang ditawarkan oleh Baznas, sebuah organisasi pemerintah yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.<sup>5</sup> TURC juga membantu usaha kelompok yang dibentuk kelompok-kelompok pekerja rumahan di Sukabumi, Sukoharjo dan Tangerang untuk mendapatkan izin usaha.

### **Kelompok Pekerja Rumahan Alat Pemanggang (*Wire Grill*), Deli Serdang (Maret 2015)**

Sebelum kelompok ini dibentuk, banyak pekerja rumahan tidak mengenal satu sama lain, walaupun mereka mungkin tinggal bersebelahan jalan. Berkat kelompok ini, semua pekerja rumahan yang membuat alat pemanggang di area ini menjadi kenal satu sama lain dan menjadi kelompok yang kompak. Bukti dari kesatuan ini tampak ketika mereka mulai menyusun strategi untuk menuntut hak mereka terkait pembayaran. Mereka bersama-sama melakukan mogok kerja hingga permintaan mereka dipenuhi oleh pemberi kerja. Pemogokan mereka berlangsung selama hampir satu minggu, dan akibatnya, pemberi kerja menaikkan upah mereka sebesar Rp1.500 per *batch*. Mereka berharap di masa depan mereka terus dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai pekerja rumahan, dan membuktikan bahwa pekerja rumahan bukanlah 'buruh murah'.

<sup>5</sup> Namun, hal ini tertunda karena pandemi Covid-19

Yasanti telah menjembatani hubungan antara kelompok pekerja rumahan dengan pemerintah daerah, sehingga kelompok pekerja rumahan di Desa Wonolelo (Kabupaten Bantul) mendapatkan pendanaan dari pemerintah desa untuk 25 anggota kelompok tersebut agar dapat menghadiri pelatihan pekerja rumahan. Sementara itu, kelompok di Semarang membangun hubungan dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dinas Koperasi dan UKM setempat tersebut meminta kelompok pekerja rumahan untuk memberikan data anggota mereka kepada pemerintah agar pemerintah dapat mengetahui keberadaannya dan memberikan dukungan di masa mendatang. Yasanti juga telah menjembatani hubungan antara kelompok kelompok pekerja rumahan dengan sektor swasta; 50 perempuan dari kelompok pekerja rumahan dampingan Yasanti di Jawa Tengah menerima pelatihan dari perusahaan bernama BCM Rajut untuk meningkatkan keterampilan merajut mereka, dan memperoleh kontrak pembuatan 100 tas rajutan untuk diekspor ke Amerika Serikat. Karena pekerja rumahan dibayar langsung oleh perusahaan, mereka juga memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan jika mereka menjual melalui perantara. TURC juga telah menjembatani hubungan antara kelompok pekerja rumahan dengan IKEA dan Zara untuk memproduksi produk yang dibuat dari enceng gondok.

Ketiga Mitra MAMPU telah mendukung para pekerja rumahan untuk mengakses perlindungan sosial, dan membantu sekitar 2.500 pekerja rumahan memperoleh BPJS Kesehatan. Selain itu, sebanyak 232 pekerja rumahan di Yogyakarta memperoleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem pembayaran triwulanan.

### **Reformasi kebijakan untuk melindungi pekerja rumahan (aset pendukung)**

Selain mendukung masing-masing anggota kelompok pekerja rumahan, ketiga Mitra MAMPU telah mencoba mengatasi kurangnya perlindungan regulasi dan kebijakan bagi pekerja rumahan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, dan mempengaruhi 26 keputusan kebijakan dan peraturan di tingkat desa dan kabupaten. TURC bersama-sama dengan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia telah berhasil membentuk koalisi untuk

### **Lismawar, pekerja rumahan dari Deli Serdang, Sumatera Utara (Nov 2018)**

Ibu Lismawar ingin membuka usaha katering dan makanan ringan (*snack*), namun pada awalnya ia merasa bingung dan tidak percaya diri untuk memulai karena tidak memiliki modal. Namun, berkat dorongan dari kawan-kawannya di Serikat BITRA, ia mendapatkan keberanian untuk meminjam uang dari credit union dan bank sehingga memiliki uang cukup untuk membuka usahanya tersebut. Sekarang, setelah lebih dari sebulan sejak usahanya berjalan, ia sudah mulai menikmati perubahan dalam pendapatan keluarganya. Sekarang, ia memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000 - 200.000 per hari. Ibu Lismawar mengatakan bahwa tidak sia-sia membentuk credit union, karena sekarang telah menjadi tempat bagi para anggota kelompok untuk menabung dan meminjam uang. Ibu Lismawar dan teman-temannya membentuk kelompok ini dengan modal sendiri, dan setiap aturan disepakati bersama, sehingga setiap anggota mempunyai rasa memiliki dan saling mendukung satu sama lain.

mengkampanyekan undang-undang yang melindungi hak pekerja rumahan di tingkat nasional, dan telah memperoleh dukungan dari para pejabat di Kementerian Tenaga Kerja (Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3/Diwasnaker). Di Sumatera Utara, BITRA dan serikat pekerja rumahan telah mengadvokasi peraturan ketenagakerjaan provinsi sejak tahun 2017. Kerja advokasi ini telah menghasilkan rancangan peraturan yang didukung oleh DPRD dan Pemprov Sumatera Utara, dan sedang dalam proses pembahasan di Kementerian Dalam Negeri. Di Yogyakarta, Yasanti dan JAMPI (Jaringan Advokasi MELINDUNGI Pekerja RUMAHAN) telah mendapatkan dukungan dari Disnaker Provinsi dan DPRD, dan sedang dalam proses pengumpulan dan pengembangan data sebagai dasar pembuatan Naskah Akademik untuk kebijakan daerah tentang pekerja rumahan yang akan dibahas pada tahun 2021.

### Singkatnya...

Dalam konteks pekerja rumahan, ketiga Mitra MAMPU yang dibahas di dalam bab ini fokus mengoptimalkan peran kelompok pekerja rumahan sebagai aset sosial dalam rangka membangun keterampilan setiap pekerja rumahan, menjembatani hubungan dengan pemerintah dan sektor swasta, serta mengakses perlindungan sosial dan dukungan finansial. Pendekatan ini mencakup empat dari lima aset (manusia, sosial, kelembagaan, dan finansial) di tingkat individu, bagi para anggota kelompok pekerja rumahan. Tidak hanya itu, aset-aset sosial ini tidak hanya menguntungkan bagi individu pekerja rumahan, para Mitra MAMPU juga menggunakan aset sosial sebagai metode untuk mengatasi isu-isu struktural yang dihadapi oleh pekerja rumahan, dengan mengkampanyekan reformasi kebijakan guna memastikan para pekerja rumahan memiliki perlindungan hukum. Dalam mengkampanyekan reformasi kebijakan pekerja rumahan, para Mitra MAMPU berhasil melibatkan kelompok pekerja rumahan, yang di tingkat individu telah menyadari hak mereka dan memiliki kemampuan advokasi, untuk menyampaikan suara dan berbagi pengalaman mereka dalam kampanye tersebut, dalam rangka membangun terciptanya lingkungan yang mendukung dan melindungi (aset pendukung) para pekerja rumahan di Indonesia.

## 4.2 Para Mitra MAMPU yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi pekerja migran

Bagian ini menyajikan ringkasan tentang kerja yang dilaksanakan oleh para Mitra MAMPU terkait pekerja migran Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan para mitra dalam hal pemberdayaan ekonomi serta pembelajaran yang diperoleh dari fase implementasi terakhir.

Secara umum, istilah "pekerja migran" dapat merujuk kepada setiap orang yang berpindah ke daerah atau negara lain untuk mencari pekerjaan. Namun, MAMPU mengikuti definisi ILO tentang pekerja migran, yaitu "orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan bekerja selain sebagai wiraswasta dan mencakup siapa saja yang diizinkan masuk secara reguler sebagai pekerja migran" (ILO, 1949).<sup>6</sup>

6 Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Bekerja (Direvisi). Konvensi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Pekerja migran menjadi salah satu fokus perhatian MAMPU karena tingginya jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini (Schaner, 2012), yaitu hingga 68 persen menurut BPS (Migrant CARE, 2020). Banyak dari mereka rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi di sepanjang pengalaman mereka bermigrasi maupun bekerja. Hal ini disebabkan berbagai isu, termasuk agen penempatan swasta yang tidak diregulasi, kurangnya layanan pemerintah untuk mendukung proses migrasi, serta kurangnya akses keadilan bagi pekerja migran yang mengalami pelecehan (Schaner, 2012). MAMPU bekerja sama dengan Migrant CARE sejak 2013 untuk mengatasi persoalan kurangnya perlindungan negara bagi hak pekerja migran, meningkatkan kapasitas dan jejaring organisasi, serta mengadvokasi layanan-layanan terkait pekerja migran. Migrant CARE bekerja dengan mitra-mitra lokal untuk memastikan tersedianya perlindungan dan layanan bagi pekerja migran hingga tingkat desa. Organisasi-organisasi ini mendukung pekerja migran di ketiga elemen teori perubahan MAMPU: aksi kolektif, meningkatkan suara dan pengaruh perempuan, dan meningkatkan akses kepada layanan pemerintah.

Bagian berikutnya berisi penjelasan singkat tentang konteks pekerja migran di Indonesia, termasuk isu-isu kunci yang dihadapi pekerja migran dan Mitra MAMPU yang berupaya mengatasi isu-isu tersebut. Bagian akhir bab ini menjelaskan tentang sejumlah kegiatan dan hasil kunci dari beberapa Mitra MAMPU yang dipilih.

### **Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terdapat lebih dari 270.000 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di luar negeri pada tahun 2019. Namun, angka-angka ini hanya mencerminkan penempatan formal. Tahun 2016, laporan Bank Dunia menyatakan bahwa ketika penempatan informal dan jumlah PMI yang sudah bekerja di luar negeri juga diperhitungkan, jumlah total PMI di luar negeri tahun itu saja kemungkinan besar sudah mencapai 9 juta jiwa (Bank Dunia, 2017). Alasan utama untuk bermigrasi adalah harapan akan peluang ekonomi yang lebih baik, menghindari pengangguran atau pengangguran terselubung, dan menerima upah lebih tinggi dibandingkan yang akan mereka terima jika tetap bekerja di negara asal (SMERU, 2016). Hal ini juga tampak di dalam data yang menunjukkan bahwa remitansi dari PMI berdampak sangat positif pada kesejahteraan keluarga mereka (Schaner, 2012; SMERU, 2016; Dewi and Yazid, 2017).

Mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan, yang cenderung bekerja di sektor informal, seringkali sebagai asisten rumah tangga (ART) (Schaner, 2012; SMERU, 2016). Sebuah studi yang dilakukan SMERU pada tahun 2014 di 15 desa dampingan MAMPU menemukan bahwa pekerja migran perempuan cenderung berada di rentang usia 20-29 tahun dan belum

menikah. Negara-negara tujuan utama mereka adalah Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Singapura (SMERU, 2016). Para perempuan ini seringkali bermigrasi berulang kali hingga berhasil mengumpulkan uang cukup untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membangun rumah, menghajikan orang tua, atau membayar utang keluarga (SMERU, 2016).

Meskipun banyak keuntungan yang dicapai dari bermigrasi untuk bekerja, risiko yang dapat dihadapi di sepanjang proses migrasi juga serius. Bermigrasi adalah kegiatan yang mahal dan memakan waktu, karena banyaknya dokumentasi yang diperlukan untuk melalui prosedur imigrasi. Salah satu studi ILO (2010) menyatakan bahwa perekrutan dapat memakan biaya setara 14 bulan upah, yang berarti mayoritas perempuan harus meminjam uang untuk membayar biaya tersebut. Alternatifnya adalah dengan bermigrasi melalui jalur yang lebih murah namun ilegal, yang membuat perempuan menjadi lebih rentan menjadi korban perdagangan orang (SMERU, 2016). Sebuah studi Bank Dunia pada tahun 2017 memperkirakan bahwa 39% pekerja migran perempuan 'tak terdokumentasi' (Schaner dan Theys, 2020). Begitu berada di luar negeri, perempuan dapat mengalami berbagai masalah seperti dokumentasi tidak lengkap, beban kerja berlebih (*overwork*) atau bahkan pelecehan oleh majikan, serta masalah komunikasi dengan majikan mereka (SMERU, 2016; Schaner and Theys, 2020). Pada saat pulang ke Indonesia, para PMI ini berpotensi mengalami masalah reintegrasi ke kehidupan desa, dan beradaptasi dengan kenyataan hilangnya sumber pendapatan stabil mereka (SMERU, 2016).

Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan legislasi untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap pekerja migran dan meningkatkan layanan bagi PMI, yang dapat dikatakan merupakan hasil kerja antara lain dari Migrant CARE dan jaringannya (lihat di bawah ini). Namun tantangan masih ada, yaitu memastikan bahwa (1) pemerintah daerah memiliki informasi dan kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab mereka di bawah undang-undang dan (2) calon PMI, PMI yang masih aktif, dan PMI yang pulang memiliki akses ke layanan pemerintah yang dapat memberikan pelatihan, informasi, dan pendampingan (Schaner and Theys, 2020).

MAMPU telah bermitra dengan Migrant CARE untuk mengatasi isu-isu yang umum dihadapi oleh perempuan PMI. Migrant CARE adalah sebuah NGO Indonesia yang berfokus meningkatkan akses perempuan PMI kepada layanan dan keadilan sosial. Migrant CARE bekerja sama dengan enam NGO lokal untuk memberikan layanan dan advokasi di tingkat regional.

## **Kegiatan Mitra MAMPU**

Bagian ini menggunakan lima aset kerangka pemberdayaan ekonomi MAMPU<sup>7</sup> untuk menjelaskan berbagai kegiatan dan hasil kunci yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Migrant CARE dan mitra-mitra lokalnya.

## **Membentuk kelompok sebagai landasan seluruh kegiatan lainnya**

Migrant CARE dan para mitranya memulai dengan membentuk kelompok-kelompok pekerja migran di wilayah-wilayah yang menjadi kantong PMI. Hingga saat ini, terdapat banyak kelompok yang dibentuk di 37 desa di delapan kabupaten di lima provinsi. Kelompok-kelompok ini terutama terdiri dari mantan PMI dan berfungsi sebagai cara untuk membangun jejaring dan aset sosial mantan PMI, yang kemungkinan akan terganggu setelah bekerja di luar negeri.

Kelompok-kelompok ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Migrant CARE dan para mitranya untuk meningkatkan kesejahteraan para PMI.

## **Menginisiasi kelompok simpan pinjam dan menghubungkan kelompok mantan PMI ke program-program pemerintah**

Salah satu kegiatan utama kelompok-kelompok PMI ini adalah membantu mantan PMI lain untuk mencari kegiatan pencaharian baru sehingga mereka terus dapat memiliki penghasilan begitu pulang ke Indonesia. Beberapa kelompok membuat kegiatan simpan pinjam tersendiri, seperti kelompok yang didampingi mitra Migrant CARE, SARI, di Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), yang berhasil menumbuhkan investasi awal yang sebesar Rp19,5 juta (diberikan oleh SARI pada 2003) menjadi Rp60 juta pada 2015. Beberapa kelompok memberikan pelatihan literasi dan keterampilan keuangan, sementara kelompok yang lain menghubungkan kelompok PMI ke bantuan pemerintah, termasuk pelatihan keterampilan untuk pengolahan makanan dan pembuatan batik, program pinjaman, serta berbagai inisiatif pemasaran pemerintah. Meskipun terdapat banyak sekali inisiatif simpan-pinjam dan bukti yang mengesankan bahwa perempuan telah meningkatkan keterampilan mereka, masih sedikit bukti yang menunjukkan semua itu berhasil meningkatkan pendapatan (Circle Indonesia, 2015; Migunani, 2017; MEDA, 2018).

## **Kelompok pekerja migran yang membuat layanan bagi calon PMI dan PMI aktif**

Kelompok-kelompok PMI juga membuat landasan untuk membentuk layanan bantuan di desa bagi para PMI dan calon PMI. Inisiatif ini berhasil membuat kelompok-kelompok PMI melobi pemerintah desa untuk mengumumkan desanya sebagai Desa PEDULI BURUH Migran (DESBUMI). Dukungan pemerintah ini memformalkan hubungan antara

<sup>7</sup> Lihat Bagian 3 untuk melihat penjelasan mengenai kerangka tersebut

### **Sriah, mantan PMI dari Banyuwangi, Jawa Timur (September 2018)**

"Teman saya mengundang saya untuk bergabung di kelompok PMI dampingan Migrant CARE. Saya senang sekali karena sekarang saya jadi punya banyak teman, dan sering diundang menghadiri pelatihan sehingga memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat. Perubahan yang saya alami sejak bergabung dengan kelompok DESBUMI antara lain adalah saya dapat membantu sesama mantan PMI dan PMI aktif ketika mereka menghadapi masalah. Dan dari pelatihan-pelatihan itu, saya belajar membuat piring anyaman yang sekarang menjadi pekerjaan saya sehari-hari dan sangat membantu pendapatan keluarga saya".

Migrant CARE, para mitra lokal dan pemerintah desa, dan menarik perhatian mereka atas isu-isu yang dihadapi para PMI di desa, serta meningkatkan peluang kelompok ini untuk mendapatkan pendanaan dari dana desa. Saat ini terdapat 37 desa di delapan kabupaten yang telah mengumumkan diri sebagai DESBUMI.

Kelompok-kelompok dan kader PMI yang dipilih untuk menjalankan DESBUMI dibekali dengan pelatihan pembangunan kapasitas oleh Migrant CARE dan para mitranya di berbagai topik, termasuk perencanaan dan penganggaran desa, penanganan kasus, dan dukungan bagi PMI yang haknya dilanggar ketika bekerja di luar negeri. Hal ini mendukung layanan DESBUMI yang memberikan informasi, sosialisasi tentang migrasi aman, bantuan untuk mengisi formulir/surat-surat, mengakses perlindungan sosial, penanganan keluhan/pengaduan, manajemen kasus, serta akses ke kegiatan penciptaan pendapatan yang ditawarkan kepada para mantan PMI. Upaya ini menghasilkan layanan dukungan yang komprehensif bagi para PMI sejak mereka

mulai berniat untuk bermigrasi untuk bekerja, ketika mereka berada di luar negeri, dan ketika mereka pulang. Semua layanan ini dapat diakses di tingkat desa. Model ini juga mengumpulkan data dari para PMI aktif dan yang sudah pulang, untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka dan kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Sebagai hasil dari penguatan kapasitas, kelompok-kelompok dampingan tersebut mulai meningkatkan layanan yang mereka berikan. Para anggota dan kader kelompok DESBUMI di Wonosobo dan Jember telah memformalkan pendampingan kasus dengan menyusun formulir keluhan/kasus dan membentuk sistem koordinasi dengan pemerintah desa dan aktor kunci lainnya. Upaya ini telah berhasil membuat beberapa DESBUMI seperti Juntinyuat di Indramayu memberikan dukungan operasional untuk penanganan kasus hukum yang dihadapi PMI. Koordinasi dengan pendampingan kasus di tingkat desa juga diperluas kepada para mitra MIGRANT CARE di berbagai daerah dan Migrant CARE di tingkat nasional. Hal ini meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada para PMI, dan memungkinkan dilakukannya mediasi dengan berbagai badan pemerintah pusat serta melakukan repatriasi. Hasil lain dari proses pembangunan kapasitas dan hubungan antara pekerja migran dengan pemerintah daerah adalah para pekerja migran perempuan menjadi semakin aktif berpartisipasi di berbagai proses pemerintah desa. Setidaknya

sebanyak 29 kelompok PMI telah dilibatkan dalam MUSRENBANG Desa, dan kader-kader DESBUMI di empat kabupaten telah menjadi calon anggota Badan PERMUSYAWARATAN Desa (BPD). Model layanan dukungan di tingkat desa bagi para pekerja migran ini, yang didukung dengan kampanye oleh Migrant CARE di tingkat nasional, telah membuat diadopsinya sebagian pendekatan DESBUMI oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2016. Versi pemerintah dari program serupa yang dinamakan Desa Migran PRODUKTIF (Desmigratif) telah dilaksanakan di 13 DESBUMI di Kabupaten Wonosobo, Banyuwangi, Jember, Lembata, Kebumen, Cilacap, dan Lombok Tengah. Kelompok-kelompok DESBUMI secara langsung mendukung dilaksanakannya program Desmigratif di lokasi-lokasi ini, termasuk dengan berbagi data yang dikumpulkan oleh kelompok DESBUMI, dan juga mendukung penyediaan layanan informasi.

### **Reformasi kebijakan untuk melindungi pekerja migran (aset pendukung)**

Kerja advokasi Migrant CARE dan para mitranya berkontribusi pada direvisinya UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya. Proses ini memakan waktu tujuh tahun, dan berhasil membuat diterbitkannya undang-undang baru (UU No. 18/2017)

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang memerintahkan peran yang lebih kuat bagi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengawasan terhadap agen-agen perekrutan dan penempatan swasta (yang seringkali eksploitatif) yang melibatkan PMI, serta mengurangi biaya bermigrasi melalui jalur resmi. Setelah UU ini disahkan, Migrant CARE dan para mitranya menggeser fokus mereka pada pengembangan peraturan pendukung di tingkat nasional, yang menghasilkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 18/2018 yang memperluas jaminan sosial pada seluruh PMI berdokumen di luar negeri, serta memastikan keselarasannya dengan berbagai peraturan di tingkat daerah.

Di tingkat daerah, Migrant CARE dan para mitranya melobi pemerintah kabupaten di Kabupaten Jember, Kebumen dan Indramayu, dan berhasil menetapkan jadwal untuk revisi peraturan daerah di agenda

### **Apiyah, mantan PMI dari Wonosobo, Jawa Tengah (Juni 2016)**

"Keberanian dan kebutuhan untuk memperbaiki perekonomian keluarga membuat Apiyah memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Taiwan menjadi tujuannya karena upahnya cukup baik dan kondisi negaranya yang aman. Keputusan ini membuat Apiyah belajar banyak tentang kehidupan sebagai PMI di Taiwan, termasuk segala permasalahannya. Ketika pulang ke Indonesia pada tahun 2008, Apiyah membuka restoran bersama keluarganya. Pada tahun 2014, ia diundang untuk bergabung ke sebuah kelompok bernama MUIWO yang dibentuk oleh pemerintah desa dan difasilitasi oleh SARI. Di kelompok ini, Apiyah dipilih untuk bergabung dengan kelompok perlindungan sosial dan advokasi, dan ia sering mengikuti pelatihan paralegal. Setelah bergabung di berbagai kegiatan perlindungan sosial di desa, serta menjadi anggota kelompok yang sering bertemu dengan pemerintah daerah, aktivis nasional, hingga Menteri Tenaga Kerja, Apiyah menjadi lebih vokal dalam hal perlindungan PMI. Saat ini Apiyah mengelola loket layanan PMI di kantor desa di Lipursari.



legislatif Kabupaten Indramayu pada tahun 2019. Para mitra di Wonosobo telah merancang dan berhasil mengadvokasi disahkannya Perda No. 8/2016 tentang penempatan dan perlindungan PMI, yang melengkapi UU nasional yang sudah ada. Selain itu, Migrant CARE telah mendampingi kelompok-kelompok tersebut untuk mengadvokasi alokasi dana desa untuk mendukung kegiatan DESBUMI.

Selain turut membangun aset pendukung para PMI melalui reformasi regulasi, Migrant CARE juga telah menangani isu logistik dan keselamatan terkait migrasi ke luar negeri. Migrant CARE dan para mitranya telah bekerja membentuk koridor migrasi antara Kabupaten Lembata di NTT dengan Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Melalui upaya-upaya advokasi yang dijalankan oleh Migrant CARE dan para mitranya, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengembangkan sebuah konsep dan mulai menelusuri peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Menyadari bahwa daerah tersebut adalah salah satu rute yang umum diambil oleh para PMI dari Indonesia Timur, konsep ini akan membentuk sebuah rumah singgah (*half-way house*) untuk membantu menjamin keselamatan PMI yang menggunakan koridor ini untuk bermigrasi. Rencana yang awalnya diusulkan hanya untuk mendukung para PMI dari Kabupaten Lembata ini akhirnya diperluas hingga meliputi para migran dari semua wilayah di NTT, dan direncanakan bahwa setiap kabupaten di NTT akan turut berkontribusi menanggung biayanya.

### **Singkatnya...**

Untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi PMI, Migrant CARE dan para mitra lokalnya mengoptimalkan peran kelompok-kelompok PMI sebagai aset sosial dalam rangka membangun kapasitas setiap anggota kelompok untuk mencapai dua tujuan. Pertama, meningkatkan keterampilan penciptaan pendapatan dan aset finansial setiap anggota, baik secara langsung melalui pelatihan keterampilan dan kelompok simpan pinjam, atau dengan menjembatani hubungan untuk mengakses program-program bantuan pemerintah. Tujuan kedua dari membentuk kelompok dan membangun kapasitas adalah mendukung pendirian dan pelaksanaan layanan bantuan di tingkat desa bagi calon PMI dan PMI aktif saat ini. Pendekatan ini mencakup empat dari lima aset (manusia, sosial, kelembagaan dan finansial) di tingkat individu bagi para PMI aktif dan mantan PMI di desa-desa DESBUMI. Migrant CARE dan para mitranya juga menggunakan aset sosial sebagai metode mengatasi isu-isu struktural yang dihadapi seluruh pekerja migran, dengan mengkampanyekan reformasi kebijakan untuk memastikan perlindungan hukum dan keselamatan ketika PMI berangkat dan bekerja di luar negeri.

# 05

## 5. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini dimulai dengan menjawab pertanyaan *"apa yang dapat kita pelajari dari berbagai pendekatan para Mitra MAMPU terkait pemberdayaan ekonomi?"*, dimana pertama-tama dilakukan dengan cara membandingkan pendekatan dan cara yang digunakan oleh keempat Mitra MAMPU<sup>8</sup> di dalam laporan ini dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi, kemudian melakukan identifikasi beberapa implikasi yang bersifat potensial.

### 5.1 Perbandingan berbagai pendekatan Mitra MAMPU

Untuk memahami cara-cara yang digunakan para Mitra MAMPU untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, bagian ini akan membandingkan pendekatan para mitra dengan tiga cara:

(1) **Aset** (*apa aset pemberdayaan yang menjadi fokus para mitra?*)

Kegiatan para Mitra MAMPU mendukung perempuan untuk meningkatkan aset mereka. Sebagian mitra memilih berfokus pada sebagian atau keseluruhan aset, bergantung pada pendekatan apa yang mereka gunakan. Perlu dipahami bahwa para Mitra MAMPU sendiri tidak selalu mengkonseptualkan kerja mereka dengan metode ini, namun metode ini berfungsi sebagai alat untuk memahami intervensi dan hasil yang diharapkan oleh para mitra tersebut.

(2) **Institusi** (*bagaimana para mitra mengatasi isu-isu struktural terkait dengan pemerintah dan sektor swasta?*)

Kelima aset pemberdayaan ekonomi juga dapat dipengaruhi secara eksternal oleh dua aktor struktural kunci: pemerintah dan swasta. Keduanya memiliki kemampuan untuk memperkuat atau melemahkan akses perempuan ke masing-masing dari kelima aset tersebut, sehingga para Mitra MAMPU dapat memilih untuk mengatasi isu-isu struktural ini sebagai bagian dari pendekatan mereka dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

(3) **Strategi** (*whapa pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan saat ini versus peluang ekonomi baru?*)

Selain aset-aset pemberdayaan ekonomi dan isu-isu struktural yang mempengaruhinya, terdapat pula pertimbangan apakah (a) akan berfokus pada peningkatan kegiatan yang sudah ada bagi perempuan, atau (b) memperkenalkan kegiatan ekonomi baru sebagai sumber pendapatan tambahan atau sebagai sumber pendapatan alternatif. Para mitra dapat mengambil pendekatan strategis yang berbeda, bergantung pada kebutuhan perempuan yang mereka dampingi, serta potensi kegiatan ekonomi yang sudah ada maupun alternatif..

Elemen kedua dan ketiga diadopsi dari Kerangka Pencarian Berkelanjutan (*Sustainable Livelihoods Framework*)<sup>9</sup> (Levine, 2014), yang juga menggunakan model aset (serupa dengan MAMPU), namun

<sup>8</sup> Untuk memudahkan, Migrant CARE dan para mitra lokalnya akan dianggap sebagai satu entitas di sepanjang dokumen ini.

<sup>9</sup> Kerangka ini awalnya dikembangkan oleh DFID pada tahun 1999

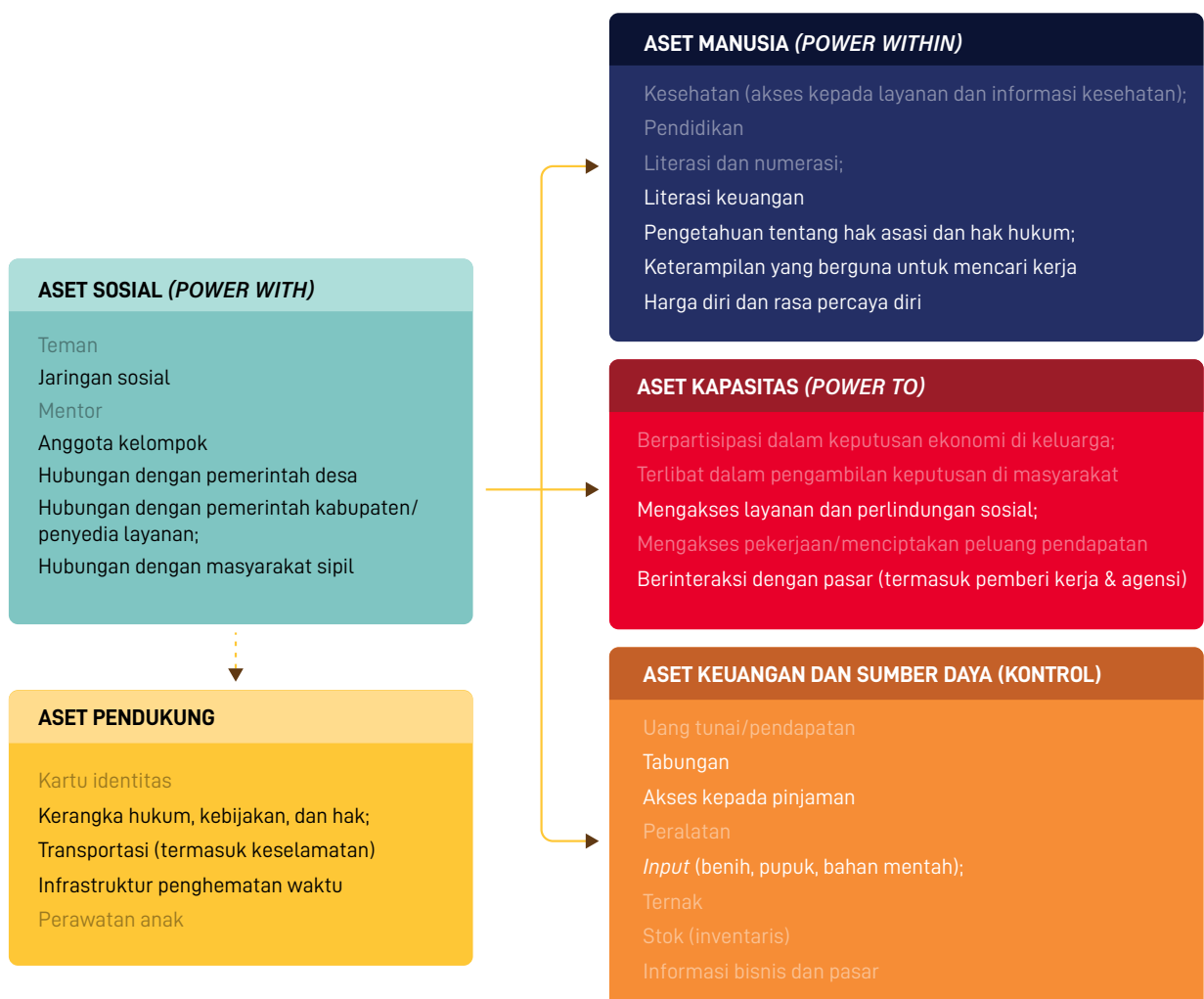
ditambahkan "lembaga" dan "strategi" untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut guna membantu para aktor pembangunan dalam merancang dan menganalisis kegiatan dan proyek yang bertujuan mendorong keberlanjutan ekonomi di tingkat individu maupun rumah tangga.

## Aset Pemberdayaan Ekonomi

**Keempat Mitra MAMPU telah melaksanakan intervensi yang melingkupi kelima aset, dan menunjukkan pemahaman tentang berbagai isu yang dihadapi PMI dan pekerja rumahan, serta kebutuhan atas penggunaan pendekatan yang holistik dalam mengatasi isu-isu tersebut.**

**Keempat Mitra MAMPU berfokus pada aset sosial sebagai titik masuk.** Tidak hanya meningkatkan aset sosial para anggota kelompok dengan menghubungkan anggota kelompok satu sama lain, organisasi lain, atau pemerintah daerah, namun juga sebagai pendekatan utama yang digunakan untuk meningkatkan aset pemberdayaan lainnya - lihat diagram Teori Aksi (*Theory of Action*) di bawah ini (intervensi dalam teks putih tebal adalah intervensi para Mitra MAMPU). Gambaran ini juga menunjukkan penekanan MAMPU pada aksi kolektif sebagai langkah pertama dari teori perubahan MAMPU.

### INTERVENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI OLEH MITRA MAMPU (TEORI AKSI)



**Catatan:** Diagram Teori Aksi (*Theory of Action*) hanya menggambarkan area intervensi mitra, dan tidak menggambarkan HASILNYA.

Seluruh mitra kemudian menggunakan kelompok-kelompok ini untuk membangun aset manusia dan kelembagaan para anggota kelompok. Meningkatkan fokus aset manusia pada pengetahuan dan keterampilan, meskipun dalam topik yang berbeda-beda pada setiap mitra. Empat area kunci dalam hal ini adalah: pemahaman atas hak (semua mitra), keterampilan bernegosiasi (Yasanti dan BITRA), keterampilan kreatif seperti pemrosesan makanan, menjahit dan membatik (semua mitra), literasi keuangan (Migrant CARE, Yasanti dan BITRA), dan keterampilan berbisnis. Selain itu, Migrant CARE memberikan pelatihan spesifik bagi kelompok PMI untuk menjadi paralegal, mengumpulkan data, dan memberikan layanan administratif yang terkait dengan DESBUMI. Para mitra meningkatkan aset agensi para anggota kelompok dengan mendukung akses ke perlindungan sosial, layanan pemerintah untuk pelatihan keterampilan kreatif dan bisnis, serta keuangan (semua mitra). Migrant CARE juga memberikan layanan bagi para PMI melalui DESBUMI, sementara Yasanti menjembatani hubungan antara kelompok pekerja rumahan dengan sektor swasta.

Meskipun pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Program MAMPU, pendekatan ini bukan tanpa risiko, mengingat perkembangan seluruh aset lainnya (kecuali aset pendukung) menjadi bergantung pada kelompok pekerja rumahan dan kelompok PMI sebagai titik masuknya (aset sosial). Jika seseorang tidak dapat mengakses kelompok tersebut (baik karena kelompok tersebut kehilangan pendanaan, atau akibat perselisihan), maka banyak manfaat dari aset-aset pemberdayaan lain juga akan hilang. Migrant CARE berhasil memitigasi hal ini, yang terbukti dengan bagaimana layanan yang diberikan oleh DESBUMI sebagai sebuah aset agensi dapat diakses seluruh PMI di desa dan tidak bergantung pada keanggotaan mereka pada kelompok.

**Yasanti dan TURC adalah dua mitra yang telah terlibat langsung dengan sektor swasta.** Yasanti dalam pendampingannya pada para perajut dari kelompok perempuan dan BMC Rajut berperan sebagai penghubung, mengkoordinasi pembangunan kapasitas para perajut perempuan, dan memediasi para perajut dan perusahaan. Demikian pula, TURC telah menjembatani hubungan antara perempuan pekerja rumahan dengan Zara dan IKEA untuk membuat produk-produk dari enceng gondok. Para mitra lain memberikan dukungan tidak langsung untuk membantu perempuan terlibat dengan sektor swasta, dengan memberikan pelatihan untuk (a) meningkatkan keterampilan kreatif pekerja rumahan dan pekerja migran sehingga dapat membuat produk untuk dijual, atau (b) meningkatkan keterampilan negosiasi pekerja rumahan sehingga dapat bernegosiasi dengan pemberi kerja mereka, serta memberikan koneksi ke berbagai toko dan organisasi untuk menjual produk tersebut. Namun, para mitra ini belum terlibat langsung di dalam rantai nilai.

**Sebagai cara untuk membangun aset finansial dan sumber daya, para Mitra MAMPU fokus pada simpanan dan akses kepada pinjaman,** baik melalui kelompok simpan, koperasi, maupun menghubungkan anggota dengan pinjaman pemerintah. Terdapat intervensi dari beberapa mitra (di samping kerja Yasanti dengan BMC Rajut, dan TURC dengan Zara dan IKEA) yang berfokus pada penciptaan pendapatan langsung, penyediaan peralatan, atau informasi bisnis dan pasar. Hal ini terkait dengan poin di atas, yaitu tentang keterlibatan langsung (secara minimal) dengan sektor swasta, serta keputusan untuk fokus mendukung perempuan untuk membentuk usaha pribadi atau kelompok, atau meningkatkan keterampilan negosiasi. Keputusan-keputusan ini berarti intervensi-intervensi tersebut terbatas pada pembangunan kapasitas (aset manusia)

dan meningkatkan hubungan dengan layanan pemerintah dan sektor swasta (aset sosial dan agensi). Hasilnya adalah (potensi) peningkatan pendapatan. Namun, karena para Mitra MAMPU tidak berpartisipasi langsung dalam menjalankan usaha-usaha tersebut, mereka tidak dapat dikatakan melaksanakan intervensi penciptaan pendapatan.

**Seluruh mitra berfokus pada isu regulasi. Hanya Migrant CARE yang juga berupaya untuk fokus pada elemen lain dari aset pendukung.** Seluruh mitra mengkampanyekan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dan PMI di tingkat nasional dan daerah. Kerja ini sering kali dilaksanakan oleh Mitra MAMPU sebagai bagian dari agenda advokasi organisasinya, dimana kampanye-kampanye tersebut mengoptimalkan peran aset sosial kelompok pekerja rumahan dan PMI untuk menambahkan suara dalam upaya advokasi di tingkat nasional, serta kampanye perubahan di tingkat lokal. Selain perlindungan hukum, Migrant CARE juga meningkatkan aset pendukung bagi pekerja migran dengan mendukung pemerintah mengembangkan koridor PMI untuk memfasilitasi migrasi aman.

**Fokus utama legislasi secara akurat mencerminkan isu-isu yang dihadapi PMI dan pekerja rumahan, di mana kurangnya perlindungan hukum sebagai salah satu akar penyebab kerentanan.** Penitipan anak seringkali disebutkan di berbagai literatur berdampak signifikan bagi pemberdayaan perempuan, namun hal ini belum disebutkan sama sekali oleh keempat mitra di dalam laporan ini. Hal ini tampak sejalan dengan kebutuhan PMI dan pekerja rumahan. PMI biasanya bergantung pada keluarga besar untuk merawat anak mereka ketika mereka berada di luar negeri, sehingga penitipan anak mungkin bukan merupakan intervensi yang tepat. Demikian pula, bagi pekerja rumahan, sifat kerja rumahan yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk mengerjakannya sambil tetap melaksanakan urusan rumah tangga seperti pengasuhan anak sebagai alasan utama mengapa banyak perempuan bekerja di sektor ini. Hal ini kemungkinan didorong oleh kebutuhan untuk mencari pendapatan, dan bukan keinginan murni untuk menjadi pekerja rumahan. Intervensi penitipan anak mungkin lebih sesuai untuk strategi yang bertujuan untuk membantu perempuan mengakses ekonomi formal, terutama karena banyak pekerjaan sektor informal dapat dilakukan sambil mengasuh anak.

### **Pendekatan para Mitra MAMPU terhadap dukungan kelembagaan**

Kelima aset di dalam model pemberdayaan ekonomi dipengaruhi oleh dua lembaga ekonomi kunci: sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta<sup>10</sup>. Paragraf-paragraf berikut akan membandingkan bagaimana para mitra terlibat dengan kedua lembaga ini.

**Keempat mitra telah berhasil meningkatkan akses perempuan ke berbagai layanan pemerintah, skema perlindungan sosial pemerintah, dan telah mengadvokasi perbaikan berbagai kebijakan pemerintah.** Bagi kelompok-kelompok pekerja rumahan dan mantan PMI, pelatihan dan layanan pemerintah mencakup pelatihan keterampilan dan akses ke pinjaman. Bagi para calon PMI dan PMI aktif, Migrant CARE tidak hanya menghubungkan perempuan dengan layanan dukungan pemerintah, namun juga memperbaiki dukungan tersebut dengan mengintegrasikan DESBUMI menjadi layanan yang dijalankan pemerintah, seperti Desmigratif, dan dengan mendampingi para perempuan mantan PMI untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan berpartisipasi di dalam pembangunan desa.

Ketiga mitra yang bekerja dengan pekerja rumahan telah meningkatkan akses perempuan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja rumahan,

<sup>10</sup> Lembaga ketiga adalah organisasi masyarakat sipil, yaitu para Mitra MAMPU itu sendiri.

para Mitra MAMPU mengadvokasi perbaikan kebijakan pemerintah. Meskipun komponen kunci yang mengakui pekerja rumahan di UU Ketenagakerjaan masih belum disahkan, BITRA dan Yasanti telah berhasil mendorong beberapa kebijakan di tingkat lokal yang melindungi pekerja rumahan. Hal ini setidaknya mampu mendemonstrasikan bahwa reformasi kebijakan di tingkat lokal mungkin untuk dilakukan, meski belum adanya perubahan pada regulasi di tingkat nasional sebagai rujukan. Migrant CARE telah berkontribusi dalam pengesahan dua komponen kunci legislasi nasional untuk menjamin perlindungan PMI, meningkatkan tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi layanan migrasi, dan menjamin perlindungan sosial ketika PMI berada di luar negeri.

**Salah satu kekurangan dari fokus kepada pemberian layanan oleh pemerintah adalah bahwa kualitas layanan yang disediakan tidak selalu berkualitas tinggi ataupun sesuai dengan kebutuhan perempuan yang mencari sumber pendapatan alternatif.** Program-program pelatihan pemerintah cenderung berfokus pada keterampilan, seperti cara membuat suatu produk seperti kue, makanan ringan atau batik, namun tidak banyak berfokus pada keterampilan bisnis seperti perencanaan biaya, pengembangan produk, dan pemasaran. Pelatihan keterampilan murni kemungkinan besar sesuai bagi perempuan yang sudah memiliki usaha dan ingin membesarkannya (seperti penjahit yang mempelajari teknik jahit baru, atau menghadiri kursus desain pakaian) karena mempelajari keterampilan baru dari awal sangat sulit, dan menggunakan keterampilan ini untuk membuat produk yang berharga pantas memang membutuhkan waktu dan komitmen yang tidak sedikit. Mitra-mitra yang memberikan pelatihan keterampilan bisnis seringkali berasumsi bahwa sudah ada pasar untuk produk/keterampilan yang diajarkan. Padahal, para peserta yang menghadiri pelatihan jarang melakukan penelitian pasar apa pun, dan sebagaimana dilaporkan oleh para perempuan dari kelompok Mitra MAMPU, banyak dari mereka akhirnya kesulitan memasarkan produk-produknya (MEDA, 2018; Migunani, 2017).

**Terdapat beberapa contoh tentang bagaimana para Mitra MAMPU membantu meningkatkan akses perempuan ke pelatihan sektor swasta, layanan, kebijakan, maupun skema perlindungan sosial.** Kecuali Yasanti yang menghubungkan para perajut secara langsung dengan pelatihan sektor swasta, belum ada contoh lain di mana Mitra MAMPU melibatkan sektor swasta atau perusahaan sosial (*social enterprise*) yang menawarkan layanan serupa dengan yang ditawarkan para Mitra MAMPU maupun pemerintah.

### **Strategi Mitra MAMPU terkait penciptaan pendapatan**

Kegiatan penciptaan pendapatan seringkali menjadi aspek kunci dari intervensi pemberdayaan ekonomi, dan dalam proses perencanaan untuk peningkatan pendapatan, terdapat beberapa strategi potensial yang dapat dipertimbangkan, termasuk: (1) apakah akan mengintensifkan atau memaksimalkan kegiatan penciptaan pendapatan yang ada saat ini, atau mendiversifikasinya dengan berbagai jenis kegiatan penciptaan pendapatan lainnya, (2) apakah akan mempromosikan kegiatan penciptaan pendapatan di sektor formal<sup>11</sup> atau informal; dan (3) apakah akan berfokus pada lapangan kerja atau kewirausahaan sebagai strategi. **Para Mitra MAMPU yang bekerja dengan pekerja rumahan mempromosikan kombinasi lapangan kerja sebagai pekerja rumahan dan membangun usaha pribadi atau kelompok** Semua Mitra MAMPU yang bekerja dengan pekerja rumahan menggunakan pendekatan diversifikasi, dengan mendukung para pekerja rumahan untuk memahami hak-hak mereka dan meningkatkan keterampilan negosiasi mereka yang akan berguna untuk meningkatkan situasi kerja mereka saat ini. Hal ini dilakukan sambil tetap memberikan akses kepada

<sup>11</sup> Dalam konteks ini, "ekonomi formal" adalah kegiatan ekonomi yang berada di bawah peraturan negara (termasuk dalam hal pembayaran pajak) dan terdiri dari sebuah sistem kerja yang terorganisasi yang mencakup hubungan terstandarisasi antara pemberi kerja dengan pekerja, termasuk dalam hal jam kerja, remunerasi, manfaat/tunjangan dan peran, yang ditetapkan di dalam kontrak tertulis (Oviedo et al, 2009).

pelatihan keterampilan dan dukungan untuk membentuk usaha kelompok atau pribadi. Cara ini telah berhasil membuat sejumlah perempuan berhasil menegosiasikan upah yang lebih layak, serta membuka peluang sumber pendapatan baru.

**Di sisi lain, Migrant CARE mempromosikan migrasi aman bagi PMI aktif atau usaha kelompok atau pribadi bagi mantan PMI.** Dengan pekerja migran yang ada, Migrant CARE menggunakan pendekatan intensifikasi, yaitu memberikan dukungan untuk membuat kegiatan ekonomi para PMI saat ini lebih mudah dan aman, dengan memastikan perlindungan negara, dokumentasi memadai, dan dukungan registrasi dan hukum yang mempermudah calon PMI mengakses kerja-kerja migran, bermigrasi dengan aman, serta membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Bagi para mantan PMI, Migrant CARE mendorong diversifikasi, yaitu dengan mendukung perempuan membentuk usaha kelompok atau pribadi baru, serta mendukung mereka mengakses pelatihan keterampilan. Kedua pendekatan memiliki manfaatnya masing-masing. Pendekatan pertama berfokus meningkatkan kegiatan penciptaan pendapatan yang sudah ada, sementara yang satunya menciptakan sumber pendapatan tambahan. Perempuan-perempuan tersebut dapat memilih antara mengambil berbagai sumber pendapatan baru yang ada, atau memanfaatkan kegiatan penciptaan pendapatan baru untuk keluar dari kerja rumahan yang dijalani selama ini.

**Seluruh mitra memilih mempromosikan pembentukan usaha pribadi atau kelompok (kewirausahaan).** Sementara para Mitra MAMPU memberikan dukungan bagi perempuan untuk terus melakukan kerja rumahan dan kerja migran, ketika terkait kegiatan ekonomi baru, seluruh Mitra MAMPU memilih mempromosikan kewirausahaan sebagai strategi utama untuk meningkatkan pendapatan. Secara umum, para mitra mengikuti pendekatan 'tradisional', yaitu dengan mengidentifikasi usaha-usaha berdasarkan keinginan atau keterampilan kelompok pekerja rumahan atau mantan PMI, ketersediaan dan akses ke bahan mentah, disusul dengan keterampilan teknis dalam produksi produk makanan, kerajinan, pakaian, tas, dan terkadang juga keterampilan bisnis umum. Pendekatan ini seringkali dikritik di berbagai literatur pemberdayaan ekonomi, karena pendekatan seperti ini jarang memperhitungkan kebutuhan pasar, atau berbagai keterampilan bisnis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang sukses. Akibatnya, mereka sering gagal menghasilkan bisnis yang dapat dijalankan, ataupun meningkatkan pendapatan (Vadenburg, 2006; Shah and Saurabh, 2015), yang mencerminkan pengalaman beberapa kelompok perempuan yang tercatat di beberapa studi MAMPU (MEDA, 2018; Migunani, 2017).

**Tidak satu pun Mitra MAMPU yang memilih berfokus pada sektor formal.** Sebaliknya, seluruh mitra memfokuskan upaya mereka untuk memformalkan sektor-sektor informal tersebut, dengan mengkampanyekan pengakuan dan perlindungan lebih formal oleh pemerintah terhadap para pekerja rumahan dan pekerja migran sebagai langkah awal untuk mencapai kondisi kerja yang lebih aman dan adil. Terkait kegiatan ekonomi di luar kedua sektor ini, seluruh Mitra MAMPU telah mendukung UKM yang juga masuk ke dalam kategori sektor informal. Data ini menunjukkan bahwa manfaat terbesar dalam hal penciptaan pendapatan dan pengurangan kemiskinan berasal dari partisipasi di sektor formal (Schaner, 2012). Namun, bagi para mitra yang bekerja dengan perempuan di pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, mengakses pekerjaan di sektor formal dapat menjadi tantangan serius. Selain itu, prioritas terkait pekerja rumahan dan PMI adalah mengurangi kerentanan mereka di sektor-sektor ini, dan bukan membantu perempuan memasuki sektor formal.

Singkatnya, para Mitra MAMPU telah menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada aset sosial, yang mencakup kelima aset model pemberdayaan ekonomi, yang berkaitan terutama dengan pemerintah, serta bertujuan mengurangi kerentanan perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumahan dan pekerja migran. Pendekatan-pendekatan ini tidak dikembangkan dengan merujuk kepada atau sebagai hasil kerangka yang digunakan di dalam dokumen ini. Sehingga bagian berikutnya akan mengidentifikasi apa saja faktor kunci yang telah mempengaruhi cara mitra melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

## 5.2 Diskusi

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian-bagian sebelumnya, keempat Mitra MAMPU secara umum menggunakan pendekatan serupa dalam pemberdayaan ekonomi yang meliputi ketiga elemen (Aset, Lembaga, dan Strategi). Hal ini dipengaruhi oleh tiga hal: desain dan teori perubahan MAMPU, karakteristik organisasi Mitra MAMPU, dan karakteristik kelompok sasaran yang akan menjadi dampingan mereka.

### Desain dan teori perubahan MAMPU

Teori perubahan MAMPU memproyeksikan proses tiga tahap. Dimulai dari aksi kolektif, yang berkontribusi pada peningkatan upaya menyampaikan suara perempuan, yang pada akhirnya diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan akses pada berbagai layanan pemerintah. Teori ini adalah teori berbasis hak dan berfokus pemerintah, sehingga ketika masuk ke dalam kerangka pemberdayaan ekonomi, fokusnya adalah meningkatkan hak dan akses pekerja kepada sistem dukungan seperti perlindungan sosial maupun sistem yang dibuat berdasarkan kolektivisme (credit union, koperasi, dsb.). Teori perubahan yang asli menyebut 'pencaharian', namun makna istilah tersebut dan proses perubahan yang diharapkan terjadi di sepanjang usia program tidak pernah diartikulasikan secara jelas, hingga akhirnya kata tersebut dihapus pada desain tahap kedua. Keempat Mitra MAMPU yang dibahas di dalam dokumen ini berfokus terutama pada sektor publik, yang mencerminkan teori perubahan MAMPU, yang mendorong fokus pada akses kepada layanan pemerintah serta perubahan lingkungan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintah. Hal ini dapat menjadi disinsentif bagi mitra yang ingin fokus pada sektor swasta sebagai pembawa pengaruh kunci dalam pemberdayaan ekonomi.

Fokus utama keempat Mitra MAMPU adalah membangun aset sosial, yang juga mencerminkan teori perubahan MAMPU, yang menjadikan aksi kolektif sebagai langkah dasar. Model-model kolektif seperti ini memprioritaskan kelompok dan mempromosikan kesetaraan di antara anggota kelompok. Sebaliknya, sektor swasta berciri khas berorientasi laba dan kompetitif, sehingga akan lebih memilih kelompok yang sudah memiliki aset. Kondisi ini, sebetulnya menunjukkan bahwa adanya potensi saling melengkapi antara para Mitra MAMPU dan sektor swasta. Para mitra membangun setiap aset pada perempuan dan kelompoknya, sehingga (pada akhirnya) mereka dapat mengakses kesempatan yang diberikan oleh sektor swasta. Namun, perbedaan-perbedaan inheren ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan kelompok aksi kolektif mengharuskan kedua belah pihak untuk bersedia mencari pendekatan (kemungkinan besar melalui kompromi) yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dipegang kedua belah pihak. Jika pelibatan sektor swasta menjadi prioritas tinggi, eksperimen dengan alternatif selain pendekatan berbasis aset sosial mungkin dapat menjadi solusi yang lebih tepat.

Kurangnya kejelasan dalam desain awal MAMPU terkait bagaimana program ini mendefinisikan dan berupaya mencapai pemberdayaan ekonomi juga telah menjadi sebab kebingungan di kalangan para mitra. Fokus awal dari pelibatan sektor swasta dan intervensi sektor formal tidak menjadi bagian yang



tampak jelas pada desain tahap kedua, sehingga belum jelas apakah hal ini harus dilanjutkan atau tidak.

Selain itu, ekspektasi MAMPU terkait peran penciptaan pendapatan dalam pemberdayaan ekonomi juga belum diartikulasikan secara jelas. Lebih lanjut, model pemberdayaan ekonomi yang diusulkan pada tahun 2015 adalah model yang sama dengan yang digunakan oleh MAMPU untuk menjelaskan pendekatan program dalam pemberdayaan perempuan secara umum, sehingga masih tidak jelas bagaimana, atau apakah MAMPU membedakan "pemberdayaan ekonomi" dengan "pemberdayaan perempuan" secara lebih luas. Artikulasi pemberdayaan ekonomi yang jelas dan tujuannya terkait pemberdayaan perempuan oleh MAMPU atau mitra-mitranya akan membantu mengidentifikasi apakah intervensi yang dipilih oleh mitra sudah memadai dan berada pada jalur yang tepat dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan (*outcome*), dan juga jenis dukungan apa yang dibutuhkan para mitra untuk mencapai hasil-hasil tersebut.

### **Karakteristik kunci para Mitra MAMPU**

Keempat Mitra MAMPU yang dibahas di dokumen ini adalah organisasi-organisasi advokasi hak dan bersifat nirlaba, sehingga cara kerja mereka (secara umum) akan terkait mendorong aksi kolektif (aset sosial) dan menggunakan pendekatan pelibatan pemerintah. Fokus mereka dalam pemberdayaan kelompok rentan, dimana para mitra juga mengakui pentingnya pendekatan holistik, sehingga mereka lebih sesuai bagi program pemberdayaan perempuan seperti MAMPU. Karakteristik-karakteristik ini juga menunjukkan bahwa para mitra terindikasi belum memiliki pengalaman menjalankan bisnis yang sukses, termasuk kecil kemungkinan memiliki jaringan di sektor swasta (termasuk perusahaan sosial). Kondisi ini sebenarnya akan menyulitkan para mitra yang ingin fokus pada upaya penciptaan pendapatan, mengingat pelibatan sektor swasta dan latar belakang bisnis akan sangat berguna dalam merancang intervensi, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penciptaan pendapatan. Hal ini telah diatasi oleh beberapa Mitra MAMPU yang pada tahun-tahun terakhir program. Mitra berhasil menjalin hubungan dengan jaringan sektor swasta, seperti koneksi dan kemitraan antara Yasanti dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), atau kolaborasi TURC dengan perusahaan sosial Indonesia bernama Kopernik. Kemitraan ini tidak hanya memberikan peluang bisnis baru bagi para kelompok perempuan, namun juga bermanfaat sebagai cara melibatkan pada aktor dari sektor swasta di dalam upaya advokasi yang diusung oleh para Mitra MAMPU.

Penciptaan pendapatan menjadi salah satu aspek yang menjadi tantangan serius bagi para Mitra MAMPU, dan area ini sudah seringkali disorot sebagai area yang perlu diperbaiki. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengalaman Mitra MAMPU di bidang ini, mengingat tujuan intervensi mitra bukanlah menaikkan pendapatan, atau karena mitra belum mampu mencari usaha yang cocok untuk menjadi sarana bekerja sama. Mengingat banyak Mitra MAMPU adalah organisasi aktivis akar rumput dengan nilai inklusi yang kuat dan mendukung kelompok rentan, beberapa Mitra MAMPU terkadang menolak bekerja sama dengan sektor swasta disebabkan kompromi yang harus dilakukan dalam kerja sama semacam ini.

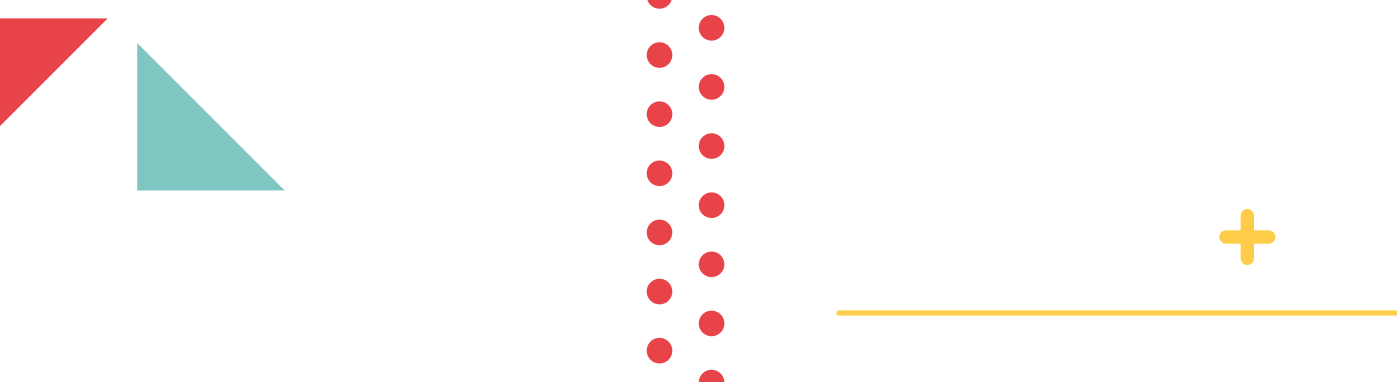
### **Karakteristik kelompok sasaran**

Satu hal yang membedakan keempat mitra di dalam dokumen ini dari Mitra MAMPU lainnya adalah bahwa perempuan-perempuan yang menjadi dampingan mereka adalah aktor ekonomi, yang berarti para perempuan yang disasar oleh para mitra dibedakan berdasarkan pencaharian mereka, misalnya pekerja rumahan atau PMI. Mitra MAMPU lainnya seperti PEKKA dan Aisyiyah mendefinisikan perempuan dampingan mereka berdasarkan status sosial, seperti "miskin" atau "rentan". Meskipun elemen-elemen pemberdayaan ekonomi (termasuk penciptaan pendapatan) dapat menjadi aspek penting intervensi mitra-mitra lainnya, tujuan mereka tidak langsung terkait dengan kegiatan perempuan di sektor ekonomi.

Keempat Mitra MAMPU yang kelompok dampingan utamanya adalah aktor ekonomi memiliki tujuan yang terhubung langsung dengan kegiatan perempuan di sektor ekonomi, namun tidak selalu memiliki fokus yang jelas untuk meningkatkan pendapatan perempuan (meskipun hal ini bisa jadi masuk ke dalam salah satu tujuannya). Fokus utama Migrant CARE adalah menjamin migrasi aman dengan mengurangi kerentanan perempuan di sepanjang proses migrasi. Sementara peta jalan tematik khusus pekerja rumahan berfokus pada reformasi kebijakan untuk perlindungan bagi pekerja rumahan, dan juga peningkatan akses ke berbagai layanan pemerintah.

Mendefinisikan tujuan pemberdayaan ekonomi dengan jelas akan membantu mengidentifikasi aset dan strategi apa yang akan digunakan, juga lembaga apa yang akan dilibatkan di dalam upaya advokasi atau untuk memberikan dukungan. Misalnya, para Mitra MAMPU yang mendefinisikan tujuan intervensi pemberdayaan ekonomi mereka sebagai kendali atas pendapatan dapat memprioritaskan simpan pinjam dan mengatasi sikap sosial terhadap gender, sementara mitra yang bermaksud membuat *exit strategy* atau mengurangi ketergantungan pada kerja eksploitatif dapat berfokus pada pendidikan vokasi atau penciptaan pendapatan. Mitra yang lain dapat berfokus pada ketahanan pangan, dan mencapai tujuannya dengan membentuk kelompok simpan-pinjam atau koperasi. Strategi-strategi ini menunjukkan sifat pemberdayaan ekonomi yang holistik yang tidak menjadikan penciptaan pendapatan sebagai strategi kunci. Namun, karena sifatnya yang holistik, penting sekali untuk mendefinisikan apa tujuan pemberdayaan ekonomi, dan strategi apa yang digunakan untuk mencapainya, agar (1) memungkinkan mitra memahami apakah intervensi mereka berpotensi memberikan kontribusi pada hasil yang diharapkan, (2) mengelola ekspektasi para pemangku kepentingan; dan (3) membantu pelaporan.

Karakteristik kelompok sasaran juga membantu menentukan strategi yang diadopsi oleh para Mitra MAMPU. Salah satu tantangan utama bekerja dengan PMI dan pekerja rumahan di sektor informal adalah sulitnya mengidentifikasi para pemberi kerja, begitu bervariasinya pekerjaan di sektor ini, dan begitu banyaknya jumlah pemberi kerja, sehingga membuat sebuah pendekatan yang melibatkan pemberi kerja menjadi tidak efisien secara waktu dan sumber daya.



# 06

## 6. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI BAGI INISIATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI MASA DEPAN

Bagian ini menyoroti pembelajaran utama yang telah diidentifikasi dari MAMPU terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, serta menyajikan sejumlah saran bagi para Mitra MAMPU, organisasi masyarakat sipil, dan program pembangunan di masa depan yang tertarik dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pembelajaran dan rekomendasi ini telah diidentifikasi berdasarkan diskusi dengan keempat Mitra MAMPU yang terlibat di dalam proses dokumentasi ini, dan mencakup tiga area kunci: merancang intervensi pemberdayaan ekonomi, mempertimbangkan konteks dan karakteristik kelompok sasaran, dan melibatkan sektor swasta.

### 6.1 Merancang dan mengelola intervensi pemberdayaan ekonomi

**Area pembelajaran pertama terkait cara-cara aktor pembangunan menstrukturkan dan mendukung proses perancangan atau desain program dan pengelolaan program atau proyek pemberdayaan ekonomi.**

Salah satu hal yang dianggap positif oleh Mitra MAMPU adalah fleksibilitas yang diberikan Program MAMPU, yang memungkinkan mereka untuk bereksperimen, belajar, dan beradaptasi di sepanjang periode implementasi. Hal ini berguna di seluruh proses perancangan dan manajemen program yang kompleks (termasuk pemberdayaan). Selain itu, pendekatan yang fleksibel dan adaptif juga dipandang sangat berguna dalam intervensi penciptaan pendapatan, di mana kegagalan usaha biasa terjadi dan tidak selalu disebabkan desain yang kurang memadai, namun disebabkan oleh sifat pasar yang dinamis. Meskipun fleksibilitas ini dianggap penting, hal ini belum disertai dengan kejelasan atau panduan yang memadai tentang apa yang diharapkan dari intervensi pemberdayaan ekonomi, atau bagaimana intervensi tersebut berkontribusi terhadap Teori Perubahan MAMPU. Hal ini khususnya terjadi pada penciptaan pendapatan. Meskipun penciptaan pendapatan seringkali dianggap sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi, setiap mitra bekerja mencapai hasil yang mencakup tujuan yang lebih luas, yang dapat dicapai tanpa meningkatkan pendapatan sama sekali. Pada kenyataannya, masing-masing dari keempat Mitra MAMPU tersebut melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, namun pengalaman mereka mengkonfirmasi berbagai literatur di tingkat global bahwa meskipun penciptaan pendapatan dapat menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi, namun itu saja tidak cukup, dan harus disertai dengan berbagai intervensi lain untuk mengatasi isu kekuasaan.

Sebagai jawaban terhadap pembelajaran ini, para aktor pembangunan dapat mempertimbangkan untuk: (1) membangun definisi yang jelas dan holistik tentang pemberdayaan ekonomi (dan peran penciptaan pendapatan) dalam konteks program atau proyek, dan bilamana memungkinkan, (2) menyediakan kerangka konseptual untuk mendukung dan menstrukturkan desain intervensi. Hal ini akan membantu mengelola ekspektasi pemangku kepentingan (khususnya terkait penciptaan pendapatan) dan menyoroti cakupan kegiatan pemberdayaan ekonomi, sekaligus menyediakan alat berpikir (kerangka konseptual) untuk membantu menstrukturkan konsep dan proses yang kompleks, seperti pemberdayaan.

Kerangka ini juga dapat membantu menciptakan bahasa yang sama, yang mampu dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat memungkinkan terjadinya diskusi yang jelas dan terstruktur terkait logika dan desain sebuah desain program.

Versi Kerangka MAMPU 2015 yang telah dimodifikasi dan digunakan di dalam dokumen ini adalah contoh dari model konseptual tersebut. Kerangka ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya sesuai dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi dan mengembangkan model konseptual lainnya: (1) kerangka ini holistik dan mempromosikan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang luas dan sejalan dengan literatur global dan pengalaman MAMPU; (2) memberikan menu pilihan yang fleksibel yang dapat diadaptasi ke berbagai konteks spesifik, yang menyediakan struktur sekaligus fleksibilitas; dan (3) dapat digunakan di berbagai tahapan di sepanjang siklus program, termasuk pada tahap desain (perancangan), pemantauan (*monitoring*), refleksi, dan pelaporan, untuk memberikan struktur dan arah yang diperlukan. Berikut ini adalah sebuah contoh proses desain yang menggunakan kerangka ini:

## CONTOH PROSES DESAIN (PERANCANGAN)

**Pertanyaan kualifikasi** - Apakah suatu aktor atau isu ekonomi menjadi aspek kunci pada hasil akhir program?

### Pertanyaan Desain 1

- Dari kelima aset, aset mana saja yang harus menjadi fokus dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan?
- Elemen mana dari setiap aset tersebut yang paling sesuai dan relevan untuk mencapai hasil yang diharapkan?



### Pertanyaan Desain 2

Untuk setiap aktivitas atau kegiatan: Apakah kegiatan yang akan dilakukan perlu atau akan melibatkan atau perlu berkolaborasi dengan pemerintah atau sektor swasta? Atau kombinasi keduanya? Atau, apakah aktor pembangunan (masyarakat sipil) akan melakukan aktivitas ini secara independen?



### Pertanyaan Desain 3

- Jika penciptaan pendapatan adalah bagian dari strategi:
- Apakah akan difokuskan pada diversifikasi aktivitas penciptaan pendapatan, atau mengintensifkan aktivitas yang sudah ada?
  - Apakah akan difokuskan pada mendorong kewirausahaan atau akses pada lapangan kerja?
  - Apakah intervensi ini akan mempromosikan aktivitas di sektor ekonomi formal atau informal?



Contoh bagaimana ilustrasi di atas digunakan, sebagai berikut:

- Di awal proses perancangan/desain, aktor pembangunan dapat menggunakan pertanyaan desain 1 dan kelima aset sebagai alat penilaian/asesmen, atau melakukan curah pendapat atau ide (*brainstorm*) tentang aset mana yang harus difokuskan, dan elemen apa saja yang paling sesuai untuk digunakan di suatu konteks spesifik.

*Dalam konteks para Mitra MAMPU, setiap pihak memutuskan bahwa cara utama yang akan mereka lakukan dalam pemberdayaan ekonomi adalah mendirikan kelompok pekerja rumahan dan pekerja migran. Kemudian menggunakan kelompok-kelompok tersebut sebagai dasar mengembangkan aset manusia, agensi dan finansial. Salah satu elemen aset finansial dan sumber daya yang dipilih oleh para mitra, baik yang bekerja dengan pekerja rumahan maupun pekerja migran adalah skema "pinjaman".*

- Sebagai bagian dari aktivitas perancangan skema pinjaman, para aktor pembangunan dapat menggunakan pertanyaan desain 2 untuk mempertimbangkan opsi-opsi advokasi, bekerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta, maupun membuat sendiri produk atau melaksanakan layanan tersebut.

*Dalam konteks para Mitra MAMPU dan kegiatan skema pinjaman yang dilakukan, BITRA memutuskan akan memberikan layanan pinjaman secara mandiri, dengan cara memberikan pendampingan pembentukan sebuah kredit union yang terdiri dari para anggota kelompok pekerja rumahan BITRA. Sementara Migrant CARE menggunakan kombinasi masyarakat sipil (Migrant CARE memberikan layanan simpan pinjam sebagai salah satu layanan bagi kelompok pekerja migran) dan Pemerintah (dengan menghubungkan kelompok-kelompok kepada skema pinjaman pemerintah).*

- Para aktor pembangunan yang berencana melakukan intervensi penciptaan pendapatan dapat menggunakan pertanyaan desain 3 untuk memutuskan strategi mana yang paling sesuai bagi perempuan di kelompok sasaran mereka masing-masing. Bilamana sesuai, strategi yang digunakan dapat hanya satu untuk keseluruhan kelompok maupun beberapa.

*Dalam konteks Migrant CARE, kegiatan penciptaan pendapatan yang mereka lakukan bagi mantan PMI adalah diversifikasi dalam kewirausahaan di sektor informal.*

## Ringkasan

- **Pelajaran 1:** Program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi memerlukan pendekatan yang fleksibel yang memungkinkan terjadinya pembelajaran dan adaptasi di sepanjang kurun program.
- **Pelajaran 2:** Penciptaan pendapatan hanya salah satu aspek dari pemberdayaan ekonomi, dan penekanan pada penciptaan pendapatan berbeda-beda di setiap program dan proyek, bergantung pada konteks dan hasil yang diinginkan.
- **Rekomendasi 1:** Aktor pembangunan perlu membangun definisi yang jelas dan holistik tentang pemberdayaan ekonomi (dan peran penciptaan pendapatan) dalam konteks program atau proyek.
- **Rekomendasi 2:** Program pembangunan harus menyediakan kerangka konseptual untuk mendukung dan menyusun struktur rancangan intervensi baik di tingkat program maupun proyek.

## 6.2 Karakteristik dan konteks kelompok sasaran

**Area pembelajaran kedua terkait dengan pentingnya memahami karakteristik dan konteks perempuan yang menjadi sasaran intervensi pemberdayaan ekonomi.**

Belajar dari proses pemilihan dan perancangan intervensi pemberdayaan ekonomi, para mitra mengidentifikasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan: Pertama, para Mitra MAMPU menemukan bahwa tidak semua perempuan di dalam kelompok dampingan cocok dengan kewirausahaan yang memang memerlukan keterampilan dan karakteristik tertentu. Hal ini akan sangat berpengaruh pada berhasil tidaknya usaha mereka. Kedua, di sepanjang Program MAMPU, para kelompok perempuan seringkali menyatakan bahwa fleksibilitas kerja adalah faktor penentu utama ketika memilih apakah akan memulai atau terus bekerja di dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan meskipun bayaran dan kondisinya tidak dapat dikatakan layak. Ketiga, para mitra yang melibatkan laki-laki di dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan menemukan bahwa cara ini terbukti meningkatkan dukungan terhadap kegiatan mereka, dan memberikan peluang untuk mengatasi isu terkait sikap laki-laki terhadap gender. Hal ini, sesuai dengan berbagai literatur global, yang menyatakan upaya ini juga dapat mengurangi potensi konflik di rumah tangga, yang diketahui sering terjadi di dalam situasi di mana kendali perempuan terhadap sumber daya meningkat, khususnya jika hal ini dianggap bertentangan dengan norma sosial setempat.

Ketiga faktor yang didasarkan pada pengalaman para Mitra MAMPU ini menyoroti pentingnya memahami kebutuhan perempuan terkait kegiatan ekonomi dan konteks tempat mereka tinggal. Seluruh program dan proyek pemberdayaan perempuan harus melibatkan perempuan dengan sebanyak mungkin cara di sepanjang proses berlangsung. Namun, pembelajaran ini menunjukkan bahwa para aktor pembangunan di tingkat proyek (minimal) harus mempertimbangkan untuk melibatkan perempuan sejak tahap desain intervensi, dengan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan mereka, dan berkolaborasi dengan perempuan untuk mengidentifikasi setiap kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan intervensi. Pendekatan yang transparan dalam proses merancang intervensi guna mengidentifikasi tantangan dan peluang, tidak hanya akan berguna untuk mencegah pandangan bahwa pekerja rumahan, pekerja migran, dan lainnya sebagai satu kelompok homogen, namun juga memberikan kesempatan kepada perempuan (secara individu) untuk memutuskan pendekatan mana yang paling sesuai bagi mereka. Cara ini juga akan menciptakan ekspektasi yang realistis terkait tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Memang para mitra tidak akan selalu bisa memenuhi seluruh opsi yang dianggap prioritas bagi perempuan dampingan, namun setidaknya, mengetahui mana saja opsi yang lebih dipilih oleh kelompok sasaran akan membantu untuk mengidentifikasi: (1) pihak ketiga lainnya yang dapat membantu para perempuan tersebut, (2) opsi mana yang paling masuk akal, dan/atau (3) perempuan mana saja yang paling diuntungkan dari setiap pilihan intervensi.

## Ringkasan

- **Pelajaran 3:** Kewirausahaan belum tentu cocok bagi semua orang, dan keterampilan, sikap dan preferensi perempuan harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan kewirausahaan sebagai intervensi.
- **Pelajaran 4:** Jam kerja yang fleksibel adalah salah satu syarat yang penting bagi banyak perempuan di pedesaan Indonesia, yang seringkali lebih penting dibandingkan jumlah nominal upah maupun kondisi kerja.
- **Pelajaran 5:** Melibatkan laki-laki di dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan meningkatkan dukungan bagi partisipasi perempuan dan memberikan peluang untuk mengatasi isu terkait sikap laki-laki terhadap gender.
- **Rekomendasi 3:** Melibatkan perempuan di dalam perancangan dan pemilihan kegiatan pemberdayaan ekonomi, bersikap transparan terhadap setiap kelebihan dan kekurangan atas setiap pilihan intervensi, dan juga potensi tantangan di masa depan.
- **Rekomendasi 4:** Mengidentifikasi cara-cara untuk melibatkan laki-laki di berbagai tahap di sepanjang proses pelaksanaan untuk membantu membangun dukungan bagi kegiatan pemberdayaan perempuan dan juga mengatasi isu sikap terkait gender.

## 6.3 Kolaborasi dengan sektor swasta

**Bagian ini mengidentifikasi pembelajaran dari para Mitra MAMPU dalam berkolaborasi dengan sektor swasta**

Para Mitra MAMPU yang dicakup di dalam dokumen ini adalah organisasi-organisasi berbasis hak yang berpengalaman luas di bidang advokasi serta memiliki jaringan yang luas di akar rumput dan pemerintahan. Di awal Program MAMPU, para mitra masih kurang memiliki keterampilan bisnis dan jaringan sektor swasta, sehingga mengalami kesulitan ketika merancang intervensi pemberdayaan ekonomi, khususnya yang terkait dengan kewirausahaan. Pada beberapa tahun setelahnya, Program MAMPU menjembatani berbagai organisasi mitra dengan perusahaan sosial seperti Kopernik, atau para mitra sendirilah yang mencari pihak swasta untuk diajak bekerja sama. Kolaborasi ini menciptakan jaringan sektor swasta, dan juga akses kepada pasar dan pengetahuan bisnis, yang melengkapi kekuatan dari para Mitra MAMPU.

Kebutuhan akan pengetahuan dan dukungan sektor swasta ini tercermin di dalam berbagai intervensi penciptaan pendapatan yang dipilih oleh para Mitra MAMPU. Intervensi utamanya adalah kewirausahaan, sementara pendekatan utamanya dalam memilih produk dan layanan yang akan dijual dengan mengidentifikasi keterampilan dan sumber daya yang tersedia di

sekeliling perempuan yang didampingi. Meskipun hal-hal ini adalah pertimbangan penting, kurangnya pemahaman para mitra terkait apakah ada kebutuhan yang nyata di pasar atas keterampilan atau produk tersebut dan juga seberapa besar tingkat permintaan yang ada, akhirnya membuat para Mitra MAMPU dan kelompok perempuan mengalami kesulitan dalam memasarkan dan/ atau memenuhi permintaan/ pesanan. Para Mitra MAMPU menyadari bahwa isu-isu ini seharusnya telah dipertimbangkan sejak awal sebagai bagian dari proses memutuskan produk atau jasa yang akan dijual, dan bukan baru dipikirkan setelah produk atau jasa tersebut diproduksi dan/atau mencapai kualitas yang memadai. Ini merupakan keterampilan yang dapat dikonstruksikan oleh perusahaan sosial dan bisnis dalam intervensi mitra, yang sangat berguna khususnya bagi organisasi yang memiliki pengalaman bisnis terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, sangat disarankan agar proyek-proyek melakukan identifikasi berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan dukungan sektor swasta, serta bekerja sama dengan mereka untuk tujuan ini. Peran potensial bagi sektor swasta mencakup:

1. Mendukung aspek-aspek intervensi pemberdayaan ekonomi, seperti dengan bekerja sama dengan perusahaan sosial seperti Amaritha<sup>12</sup>, untuk memberikan layanan simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Cara ini akan mengurangi beban para Mitra MAMPU (sehingga dapat berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi lainnya), karena organisasi-organisasi ini umumnya berspesialisasi di pinjaman mikro, memiliki model yang teruji, dan seringkali memberikan dukungan bagi perempuan sebagai bagian integral dari layanan mereka.
2. Sasaran potensial untuk mengadvokasi dan kolaborasi untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja, yang akan menguntungkan seluruh pekerja pada rantai pasok mereka.
3. Memberikan dukungan dan pelatihan untuk melibatkan perempuan di dalam rantai nilai mereka sendiri. Ini serupa dengan pendekatan yang digunakan Yasanti dan BMC Rajut, di mana BMC Rajut sepakat untuk memberikan pelatihan kepada kelompok pekerja rumahan perempuan, yang membantu BMC Rajut meningkatkan jumlah produsen.

Kekuatan tradisional organisasi masyarakat sipil di bidang hak pekerja, aksi kolektif dan pengorganisasian akar rumput memiliki potensi untuk membuat mereka mudah bekerja sama dengan organisasi sektor swasta (khususnya perusahaan sosial) yang tertarik mendampingi kelompok perempuan pedesaan dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, namun tidak memiliki kapasitas atau jaringan untuk menjangkaunya dan mengembangkan keterampilan mereka.

Namun, meskipun kolaborasi dengan sektor swasta sama-sama dapat bermanfaat, mungkin tidak semua organisasi masyarakat sipil cocok dengan cara ini, yang disebabkan oleh adanya konflik nilai. Dari perspektif program, penting sekali mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil mana saja yang bersedia bekerja sama dengan sektor swasta dan mana yang tidak. Ini bukan berarti organisasi masyarakat sipil yang tidak bersedia berkolaborasi dengan sektor swasta tidak cocok untuk dilibatkan dalam intervensi pemberdayaan ekonomi.

12 Platform pinjaman peer-to-peer yang memberikan pelatihan bisnis dan keuangan bagi perempuan di pedesaan, dan pemenang DFAT Innovation Xchange 2017.



Namun, nilai-nilai mereka penting untuk diidentifikasi dan didiskusikan sejak awal agar mitra tidak merasa terpaksa untuk bekerja sama dengan sektor swasta, dan untuk memahami sejauh mana hasil pemberdayaan ekonomi yang ditetapkan dapat dicapai meski tanpa dukungan pihak swasta.

Kolaborasi dengan sektor swasta menciptakan peluang bagi aktor pembangunan di tingkat program, dengan memainkan peranan sebagai penghubung antara organisasi masyarakat sipil yang bersedia bekerja sama dengan mitra sektor swasta yang sesuai. Hal ini akan sangat bermanfaat baik bagi masyarakat sipil maupun sektor swasta yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan jangkauan keduanya, yang mungkin tidak akan pernah ditemui oleh satu sama lain dalam kondisi normal atau alami. Cara ini juga dapat berfungsi sebagai kriteria untuk memindai organisasi mana yang sesuai. Keterlibatan program ini dapat membantu menjamin adanya nilai bersama yang disepakati sejak awal, dan terciptanya keseimbangan hubungan kuasa dalam berbagai negosiasi antara sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama. Hal ini dapat direplikasi di tingkat proyek. Organisasi masyarakat sipil dapat menjembatani hubungan antara aktor sektor swasta dengan kelompok perempuan, untuk memastikan kompatibilitas dan menjadi penyeimbang dalam hubungan kuasa jika diperlukan.

## Ringkasan

- **Pelajaran 6:** Memahami kebutuhan dan ketimpangan (kekosongan) di pasar harus menjadi pertimbangan utama ketika mengidentifikasi peluang kewirausahaan.
- **Pelajaran 7:** Kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dapat saling menguntungkan dan melengkapi kekuatan dan menutup kelemahan masing-masing pihak.
- **Pelajaran 8:** Kolaborasi dengan sektor swasta tidak selalu cocok bagi semua organisasi masyarakat sipil, khususnya yang memiliki agenda advokasi kuat yang bertentangan dengan sektor swasta.
- **Rekomendasi 5:** Program dan (jika memungkinkan) proyek berkolaborasi dengan sektor swasta (termasuk perusahaan sosial) untuk memperkuat intervensi dan meningkatkan kapasitas.
- **Rekomendasi 6:** Program memainkan peran perantara antara sektor swasta dengan organisasi masyarakat sipil, untuk menyaring organisasi dan sektor swasta serta memastikan bahwa nilai-nilai mereka selaras, serta mengoreksi jika terjadi potensi ketidakseimbangan kuasa antara kedua belah pihak. Organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran perantara antara organisasi sektor swasta dengan kelompok perempuan

# 07

## 7. REFERENSI

ADB (2011) *The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia*, Country Report

Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) (2017), *Women's Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change*, Monash University [accessed on 8/7/2020 at: <https://www.monash.edu/business/cdes/our-research/publications/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf>]

BPS (2019) *Februari 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01 persen*, Press Release, BPS [accessed on 17/07/20 at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html>]

Circle Indonesia (2015) *Women's Livelihood Challenges and Economic Empowerment By MAMPU Partners and Sub-Partners*, MAMPU Livelihoods Review

Dewi, E. and Yazid, S. (2017) *Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 2, Oktober 2017-Maret 2018

ILO (2010) *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*, Jakarta, ILO Jakarta

ILO (2015) *Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment*, ILO/MAMPU Report, ILO Jakarta

Levine, S. (2014) *How To Study Livelihoods: Bringing A Sustainable Livelihoods Framework To Life*, Working Paper 22, ODI

MEDA (2017) *Findings and recommendations for MAMPU thematic area 2: Improving conditions of employment and eliminating workplace discrimination*, MAMPU

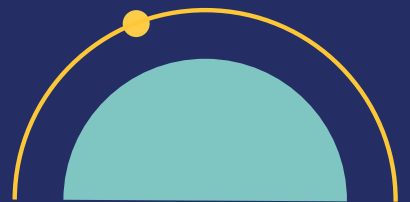
Migrant Care (2020) *Migrant CARE Outlook 2020 – Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data*, Migrant CARE Sekreteriat

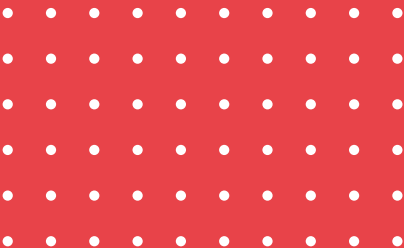
Migunani (2017) *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A study of collective action initiated by partners of the MAMPU program*, Yogyakarta: Migunani and MAMPU

- Morrison, A., Raju, D., Sinha, N. (2007) *Gender equality, poverty and economic growth*, Policy Research Working Paper 4349, World Bank
- Oviedo, A.M., Thomas, M.R, and Karakurum-Özdemir, K. (2009) *Economic Informality Causes, Costs, and Policies—A Literature Survey*, World Bank Working Paper No. 167, World Bank, Washington DC
- Schaner, S. (2012) *Gender, Poverty, and Well-Being in Indonesia: MAMPU Background Assessment*, MAMPU
- Schaner, S. and Theys (2020), *Changes in Indonesia's Gender Landscape Between 2011 and 2018: Updated MAMPU Background Assessment*, MAMPU
- Shah, H. and Saurabh, P. (2015) *Women Entrepreneurs in Developing Nations: Growth and Replication Strategies and Their Impact on Poverty Alleviation*, Technology Innovation Management Review, Volume 5, Issue 8
- SMERU (2016) *Poor Women's Livelihoods and Access to Public Services*, SMERU
- SMERU (2019) *Laporan Sintesis Studi Midline MAMPU Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*, SMERU
- Suahasil, N. (2010) *The informal economy in Indonesia: size, composition and evolution*, Working Paper, ILO
- Vandenburg, P. (2006) *Poverty reduction through small enterprises: Emerging consensus, unresolved issues and ILO activities*, SEED Working Paper No. 75, ILO
- World Bank (2012a), *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*, Washington DC
- World Bank (2012b). *World Development Report 2013 : Jobs*. Washington, DC.
- World Bank (2017) *Indonesia's Global Worker: Juggling Opportunities and Risks*, World Bank Indonesia Report



PENDEKATAN PEMBERDAYAAN  
EKONOMI PEREMPUAN  
MAMPU 2014 - 2019






**MAMPU** | Australia - Indonesia Partnership  
for Gender Equality  
and Women's Empowerment

Setiabudi Atrium, 3rd Floor, Suit 306  
Jl HR Rasuna Said, Kav 62, Jakarta  
12950 INDONESIA

 [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id)

 @ProgramMAMPU

 [info@mampu.or.id](mailto:info@mampu.or.id)

 +62 21 521 0315

